

**INTERREGIONALISME DAN TANTANGAN PEMBENTUKAN
KOMUNITAS ASEAN**



**Disusun Oleh:
Yulius Purwadi Hermawan Ph.**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Prahayangan
2012**

Daftar Isi

	Hal
Daftar Isi	2
Abstrak	4
Bab I Pendahuluan	5
Bab II. Kerangka konseptual memahami interregionalisme dan integrasi regional (Kajian Pustaka)	7
2.1. Proposisi Konseptual Hubungan Interregionalisme dan Integrasi Regional	8
2.2. Aspek utilitarian-fungsional Interregionalisme bagi komunitas regional	10
Bab III. Metode Penelitian	14
3.1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	14
3.2. Kerangka Teoretis	15
Bab IV. Pelaksanaan Penelitian	18
Bab V. ASEAN, Interregionalisme dan Integrasi Regional (Hasil dan Pembahasan)	19
5.1. Ragam tipe interregionalisme ASEAN	19
5.1.1. <i>Group-to-group interregionalism</i>	22
Kerjasama ASEAN-Uni Eropa	22
Kerjasama ASEAN-Closer Economic Relations (CER)	23
Kerjasama ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC)	24
5.1.2. <i>Bi-regional Transregional arrangement</i>	24
Asian European Meeting (ASEM)	25
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)	26
Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)	28
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)	29
5.1.3. <i>Hybrid interregionalism</i>	30
Kerjasama ASEAN-Jepang	30
Kerjasama ASEAN-Amerika Serikat	31
Kerjasama ASEAN-Australia	31
Kerjasama ASEAN-China	32
Kerjasama ASEAN dan India	33
Kerjasama ASEAN dan Korea Selatan	34
Kerjasama ASEAN dan Kanada	35
Kerjasama ASEAN dan Selandia Baru	36
Kerjasama ASEAN dan Rusia	36
Kerjasama ASEAN dan Pakistan	37

5.2. Kontribusi Interregionalisme dalam perwujudan komunitas ASEAN	37
5.2.1. Dukungan partner kerjasama interregional bagi proyek/program dalam rangka integrasi ASEAN	37
5.2.2. Dukungan Partner interregional bagi pembangunan CLMV melalui Inisiatif for ASEAN integration	45
5.2.3. Pengakuan TAC oleh partner interregional	50
5.3. Tantangan dalam perwujudan Komunitas ASEAN	54
5.3.1. Komitmen interregional dan Perlambatan integrasi ekonomi ASEAN?	54
5.3.2. Interregionalisme dan Peningkatan Pengaruh Eksternal di kawasan Asia Tenggara	57
Bab VI. Kesimpulan	61
Daftar Pustaka	63

Daftar Tabel

Tabel 1. Tipologi Interregionalisme	12
Tabel 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
Tabel 3. Pelaksanaan Penelitian	18
Table 4. Kerjasama interregional ASEAN dan anggota ASEAN	20
Tabel 5. Anggota ASEM (Total 48)	25
Tabel 6. Negara-negara anggota APEC	26
Tabel 7. Negara-negara anggota FEALAC	28
Tabel 8. Anggota BIMSTEC	29
Tabel 9. Program/Proyek yang dikembangkan ASEAN dan partner kerjasama interregional (Data ASEAN Annual Report 2010-2011)	38
Tabel 10. Kontribusi ASEAN-6 terhadap Proyek-proyek IAI	47
Tabel 11. Bantuan partner dialog dalam proyek IAI di CLMV (2002-2008)	48
Tabel 12. Kontribusi partner Dialog dan lembaga Pembangunan terhadap <i>IAI Work Plan Projects</i> Tahap I	49
Tabel 13. Pengakuan <i>Treaty of Amity and Cooperation</i> ASEAN	51
Tabel 14. Perdagangan intra dan ekstra ASEAN 2009-2010 (dalam juta dolar AS)	56

Daftar Gambar

Gambar 1. Tiga macam bentuk interregionalisme	11
Gambar 2. Lima Fungsi Interregionalisme	13
Gambar 3. ASEAN dan Partner Interregional	21

Daftar Grafik.

Grafik 1. Perdagangan intra dan ekstra ASEAN 1993, 2003 dan 2008 (dalam juta dolar AS)	55
--	----

Abstrak

Sejak tahun 1970an ASEAN telah mengembangkan *bi-regional arrangement* dengan organisasi regional di luar kawasan Asia Tenggara dan *hybrid interregionalism* dengan negara-negara yang memiliki pengaruh di kawasan ini. Anggota-anggota ASEAN juga secara individual mengambil peran aktif dalam *transregional arrangement* dengan negara-negara non anggota ASEAN. Ragam interregionalisme semakin diperkuat sejak pemimpin-pemimpin ASEAN mencanangkan cita-cita pembentukan komunitas ASEAN di tahun 2003.

Penelitian ini mengkaji kontribusi interregionalisme yang melibatkan ASEAN sebagai organisasi maupun negara-negara secara individual terhadap proses pembentukan komunitas ASEAN. Penelitian ini mengikuti argumentasi teoretisi Transaksionalisme, yang menyatakan bahwa interaksi intens dan ekstensif di antara aktor-aktor regional sangat penting untuk menghasilkan fondansi '*we feeling*' yang fundamental bagi pembentukan komunitas regional. Berangkat dari konsepsi ini, penelitian ini melihat bahwa faktor determinan untuk penguatan institusi regional bersifat endogenous – terkait kemampuan bangsa-bangsa untuk mendefinisikan identitas regional, membangun kerangka normatif dan organisasional yang menjadi '*code of conduct*' dalam interaksi reguler mereka; pendefinisian identitas regional ini merupakan hasil interaksi yang intens dan ekstensif di antara aktor-aktor yang menjadi bagian dalam proses integrasi. Pertanyaan penelitian tentang hubungan interregionalisme dan pembentukan komunitas ASEAN ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh karena interregionalisme bersentuhan erat dengan faktor yang bersifat *exogenous* yang berpotensi untuk memperlemah pembentukan 'identitas regional'.

Penelitian ini menemukan bahwa *bi-regional arrangement* dan *hybrid interregionalism* yang dikembangkan negara-negara ASEAN secara kolektif-institusional maupun *transregional arrangement* yang melibatkan negara-negara dengan kapasitas individual masing telah menjadikan konstruksi komunitas ASEAN lebih bersifat terbuka dan adaptif terhadap pengaruh ekstra regional. Interregionalisme telah membantu negara-negara anggota untuk memperkuat modalitas dan kapasitas bagi integrasi politik keamanan dan ekonomik dan memfasilitasi konektivitas di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara; dan dengan demikian secara potensial menumbuhkan nilai-nilai ke-ASEAN-an di antara mereka. Namun demikian, interregionalisme membawa tantangan aktual serius bagi konsolidasi integrasi ASEAN di bidang ekonomik dan politik-keamanan; konstruksi ASEAN tetap akan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh eksternal yang diciptakan oleh mitra-mitra interregional ASEAN.

Bab I. Pendahuluan¹

Dalam usianya yang keempat-puluh lima tahun, ASEAN dan cita-citanya menjadi rumah bagi komunitas bangsa-bangsa di Asia Tenggara, tetap menjadi suatu teka-teki yang tidak mudah untuk dijawab. Serangkaian pertanyaan tetap menyisakan kesangsian akan terwujudnya cita-cita pembentukan komunitas ASEAN 2015 yang pernah dicanangkan oleh para elit-elit penggagas integrasi ASEAN di tahun 2003. Apakah komunitas ASEAN benar-benar dapat terwujud pada tahun 2015? Apakah proyek/program dan aktivitas yang selama ini telah dijalankan ASEAN telah meletakkan fondasi kuat bagi terwujudnya komunitas ASEAN? Mengingat waktu yang sudah mendesak pertanyaan lain muncul: apakah waktu dua tiga tahun ini cukup untuk memperkuat fondasi tersebut?

“Dikagumi pengamat dari luar kawasan, dipandang sebelah mata oleh pengamat dari dalam kawasan” merupakan phrase yang kurang lebih menggambarkan realitas sosok ASEAN dan sekaligus menunjukkan suatu pembelahan perspektif di antara komunitas akademik pemerhati integrasi regional dan organisasi internasional. Bagi pengkaji dari Eropa, Amerika Serikat maupun Australia, ASEAN adalah institusi regional “terbesar” kedua yang tetap ‘survive’ melalui dua jaman: sistem bipolar perang dingin; dan sistem multipolar pasca perang dingin. ASEAN menyediakan ‘model alternatif’ dari integrasi regional, yang berbeda dengan model Uni Eropa.² Pengkaji dari negara-negara anggota ASEAN sebaliknya skeptis untuk mengambil kesimpulan bahwa integrasi regional benar-benar sedang berlangsung di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sering dikritik sebagai sekedar “*a talk shop*”, suatu perhelatan besar namun dengan aksi yang kurang memadai “*big on words but small in action*”.

Aktivitas-aktivitas ASEAN menjelang 2015, memang tercatat penting dan terkesan spektakular. Dalam KTT ASEAN ke-19 di Bali yang diselenggarakan pada bulan Nopember 2011, pemimpin-pemimpin ASEAN menetapkan suatu agenda strategik baru untuk memainkan perannya sebagai bagian dalam komunitas global. Pemimpin-pemimpin ASEAN berkeinginan besar untuk meningkatkan peran globalnya untuk turut menciptakan perdamaian dunia dalam masa mendatang. Pemimpin-pemimpin ASEAN menyadari bahwa “*this role could become strong points to develop an ASEAN common platform on global issues*”.³ Pemimpin-pemimpin ASEAN juga mengakui peran ini menjadi modal penting “untuk meningkatkan kapasitas ASEAN dalam merespon isu-isu global utama dengan mempromosikan koordinasi, koherensi dan kohesivitas yang lebih kuat terhadap posisi dan upaya-upaya ASEAN dalam meraih kesempatan di abad ke-21 ini.” Pernyataan ini mengekspresikan suatu kepentingan ASEAN untuk terus mengkonsolidasikan institusi ASEAN: yaitu dengan cara memperkuat koordinasi, koherensi dan kohesivitas di antara anggota-anggotanya. Agenda strategik baru dipandang penting untuk memperkuat

¹ Peneliti berterimakasih kepada Aussie Prasadha Bhaskoro, Vyke Valencia dan Dewi Sutjitawati atas bantuan merekadalam membantu terlaksananya wawancara-wawancara dengan narasumber. Penelitian ini merupakan bagian komitmen peneliti dalam wadah *Community of East Asian Scholars* (CEAS) dalam proyek publikasi bersama kajian Asia Tenggara. Penelitian ini mendapat dukungan dana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.

² Helen E.S. Nesaduri, “The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)”, *New Political Economy*, Vol. 13, No.2, June 2008, hal. 225.

³ Lihat klausul 143, *Chairs’ statement of the 19th ASEAN Summit*, Bali, 17 Nopember 2011.

pembangunan institusi ASEAN di tiga hal tersebut. Namun pertanyaan yang muncul adalah: apakah cita-cita menjadi *global player* tidak mencerminkan gagasan yang ambisius? Apakah cukup kuat argumentasi bahwa gagasan ini akan mempercepat konsolidasi internal ASEAN sebelum menghadapi isu-isu eksternal kawasan? Apakah ini justru menunjukkan ketidaksiapan ASEAN mengisi gap kelemahan bagi pembentukan fondasi komunitas ASEAN 2015?

Penelitian ini telah mengkaji bagaimana ASEAN dan atau negara-negara anggotanya telah mengembangkan kerjasama interregional dengan berbagai organisasi regional dari kawasan-kawasan lain dan negara-negara di luar kawasan yang berpengaruh di Asia Tenggara? Apakah interregionalisme yang dikembangkan tersebut membantu penguatan institusi regional ASEAN, terutama mendukung terwujudnya komunitas ASEAN. Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, penelitian ini melihat proyek/program dan aktivitas dalam kerjasama-kerjasama interregional yang telah dikembangkan oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya, dan kontribusinya terhadap perwujudan komunitas ASEAN.

Ide awal penelitian tentang interregionalisme dan perwujudan komunitas ASEAN muncul dalam lokakarya kajian Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Universitas Thammasat, Bangkok pada bulan Desember 2010. Sekitar duapuluh pemerhati ASEAN dari negara-negara ASEAN+Three (APT) hadir dan menggagas pentingnya kerjasama transnasional kongkrit dengan hasil yang dapat dinikmati oleh warga ASEAN secara luas. Sejumlah topik diusulkan dan disepakati, diiringi komitmen dari peserta lokakarya untuk ambil bagian dalam proyek integrasi ala akademisi. Dalam kerangka inilah, peneliti bersama dengan ‘proyeksi mitra potensial’ dari Myanmar mendapat ‘mandat’ untuk mengembangkan kajian terhadap hubungan interregional ASEAN yang dirasa belum menjadi perhatian akademisi, namun diakui penting bagi proses integrasi ASEAN menuju terbentuknya komunitas ASEAN. Penelitian tentang interregionalisme dan perwujudan komunitas ASEAN merupakan komitmen peneliti terhadap komunitas transnasional baru di Asia Tenggara, *Community of East Asian Scholars* (CEAS).

Laporan penelitian ini diawali dengan penelusuran teoretis atas sejumlah tulisan yang mengembangkan konsepsi interregionalisme dan transregionalisme. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi tentang pembangunan institusi ASEAN dan hubungan interregional yang dikembangkan oleh ASEAN dan organisasi-organisasi lain; dan juga deskripsi tentang hubungan negara-negara anggota ASEAN dengan anggota-anggota organisasi regional lain dalam wadah organisasi transregional. Analisa kontribusi kerjasama interregional dan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam mewujudkan komunitas ASEAN dibuat pada bagian akhir laporan penelitian ini. Dari analisa ini ditarik kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan.

Bab II. Kerangka Konseptual Interregionalisme dan Integrasi Regional (Tinjauan Pustaka)

Beragam kajian telah dibuat untuk melihat fungsi dari interregionalisme dan transregionalisme. Christopher Dent melihat progress yang dibuat ASEAN dan UE dalam wadah ASEM dengan memakai teori “Multilateral Utility”.⁴ Heiner Hanggi mengembangkan perspektif empirikal dan teoretikal dari interregionalism; Hanggi berargumen bahwa perkembangan interregionalism dapat memperkaya dan membuat komplikasi sistem tata pengaturan global yang bersifat multi-layer.⁵ Chen Zhimin (2005) mengkaji NATO, APEC dan ASEM sebagai interregionalism Triadic dan prospek tumbuhnya tatanan global dari hubungan interregional ini.⁶ Vinod K. Aggarwal dan Edward A Fogarty (2003) fokus pada kebijakan perdagangan UE melalui kerjasama interregional; keduanya mengidentifikasi tiga kondisi yang membuat hubungan interregional dapat berlangsung dalam area perdagangan: (1) keberlanjutan integrasi dunia; keberlanjutan ketidakpastian sekitar proses WTO; (3) keberlanjutan dukungan dari konstituensi bagi institusionalisasi hubungan komersial yang stabil dan teratur.⁷

Penelitian ini tergolong baru dalam pengertian fakta yang berkembang maupun konsepsi yang ada. Interregionalisme yang telah dikembangkan ASEAN memang telah dimulai sejak tahun 1970an atau dalam dekade pertama sejak ASEAN dibentuk di tahun 1976. Namun intensitas dan ekstensivitas dari interregionalisme tersebut baru berkembang pesat sejak tahun 1990an ketika perang dingin Blok Barat dan Timur berakhir, dan menjadi semakin menonjol sejak sepuluh tahun terakhir terutama sejak tahun 2003 ketika pemimpin-pemimpin ASEAN mencanangkan cita-cita membangun komunitas ASEAN. Konsepsi yang ada dipandang belum mencukupi untuk melihat fenomena ini dan hubungannya dengan integrasi regional. Teoretisi integrasi regional masih belum cukup mengembangkan alat analisis yang kuat untuk melihat hubungan faktor ekstra-regional dengan proses integrasi regional.

Karenanya, bagian ini mengeksplorasi proposisi-proposisi konseptual untuk melihat hubungan antara interregionalisme dan integrasi regional dan menyusun suatu kerangka untuk melihat potensi kontributif dari interregionalisme dan integrasi regional dengan mendefinisikan fenomena interregionalisme dan aspek utilitas-fungsional yang terkait dengan institution building sebagai pilar penting dari pembentukan komunitas ASEAN.

⁴ Christopher Dent (2004). “The Asia Europe Meeting and Interregionalism. Toward a Theory of Multilateral Utility.” *Asian Survey*, Vol. 44 No. 2, hal. 213-236.

⁵ Heiner Hanggi (2000). *Interregionalism: empirical and theoretical perspectives*, paper dipersiapkan untuk lokakarya: “Dollars, Democracy and Trade: External Influence on economic Integration in the Americas”, 18 Mei 2000, the Pacific Council on International Policy Los Angeles dan the Center for Applied Policy Research, Munich.

⁶ Chen Shimin, “NATO, APEC and ASEM: Triadic Interregionalism and Global Order.” *Asia Europe Journal*, 2005.

⁷ Vinod K Aggarwal dan Edward A. Fogarty. (2004). “Explaining Trends in EU Interregionalism”, dalam Aggarwal, V dan Edward Fogarty (eds.) *European Union Trade Strategies: Between Globalism and Regionalism*. London: Palgrave, 2004.

2.1. Proposisi Konseptual Hubungan Interregionalisme dan Integrasi Regional

Konsepsi regionalisme telah didefinisikan secara beragam, namun sebagian besar pengkaji menilai perspektif geografis tidak mencukupi untuk merumuskan makna regionalisme. Regionalisme adalah konsepsi yang lebih bersifat aktif dimana dalam konteks geografis telah tumbuh homogenitas sosio-kultural, politik dan ekonomik sebagai hasil dari interaksi di antara bangsa-bangsa di kawasan tertentu. Regionalisme kemudian dilekatkan dengan pengertian fungsional: regionalisme dapat menumbuhkan *common sense of identity* di antara bangsa-bangsa yang secara geografis terletak berdekatan satu sama lain (Gilson, 2007:1):

“Regionalism can strengthen, or even precipitate, the development of a common sense of identity, based on factors including history, geography and geosrtategic needs; and fostered by emergent normative frameworks adn a developing sense of we-ness.”

Mengikuti argumentasi fungsional ini, hubungan terstruktur, reguler dan intensive di antara bangsa-bangsa yang terletak di kawasan tertentu menjadi variabel penting (dan barangkali determinan) yang menentukan apakah identitas regional dapat bertumbuh di kawasan tertentu. Institusionalisasi melalui pembentukan norma-norma dan organisasi regional memperkuat konstruksi regionalisme suatu kawasan. Melanjutkan argumentasi ini, keberhasilan beberapa bangsa untuk membangun institusi regional bersifat *endogenous*, tergantung pada kemampuan bangsa-bangsa tersebut untuk “*pooling resources and even sovereignty*” (Gilson, 2007), meletakkan perbedaan di antara mereka dan sekaligus mengedepankan komonalitas di antara mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari fenomena interregionalisme terhadap proses pembentukan komunitas regional ASEAN. Dengan mengikuti argumentasi awal bahwa faktor determinan untuk penguatan institusi regional bersifat *endogenous* – terkait kemampuan bangsa-bangsa untuk mendefinisikan identitas regional, membangun kerangka normatif dan organisasional yang menjadi ‘guide’ dalam interaksi reguler mereka, pertanyaan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh karena interregionalisme bersentuhan erat dengan faktor yang bersifat *exogenous*. Interregionalisme berpotensi menyebabkan munculnya distraksi dan disorientasi dalam proses integrasi karena sifat interregionalisme yang merupakan *diverging process*; sehingga interregionalisme justru memperlemah proses integrasi yang bersifat konvergensi.

Para teoretisi integrasi selama ini kurang melihat bagaimana integrasi regional dapat berlangsung dalam konteks globalisasi dan interdependensi yang berskala global, yang dampaknya sangat besar di konteks regional.

Teoretisi Transaksionalisme melihat pentingnya interaksi di antara negara-negara yang bertetangga di kawasan tertentu sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran dan identitas regional.⁸ Interaksi yang intens dan ekstensif akan memunculkan *mutual trust*

⁸ Karl Deutsch, (1953). *Nationalism and Social Communication*. Cambridge, Mass: MIT; Karl Deutsch (1957) *Political Community and the North Atlantic Area. Nationalism and Social Communication*. NJ: Princeton UP. Lihat juga bahasan tentang Transaksionalisme dalam Yulius P Hermawan. (2007), “Supranasionalisme, Intergovernmentalisme dan Transformasi Eropa” dalam Yulius P Hermawan,

di antara negara-negara di kawasan. Dari argumentasi ini bukan ‘regionalitas’ semata yang membentuk ‘kesadaran dan identitas’ tersebut, tetapi seperangkat tindakan aktif baik intensional maupun non intensional yang menjadikan kesadaran menjadi bagian proses integrasi regional menjadi memiliki makna penting. Teoretisi Fungsionalisme dan Neofungsionalisme menekankan argumentasi yang kurang lebih sama, namun dengan menunjukkan pada aspek teknikal fungsional yang menjadikan interaksi tersebut dapat mendorong kerjasama yang semakin intens dan terinstitusionalisasi.⁹ Teoretisi Interdependensi mengukur pada derajat kondisi saling membutuhkan dan saling mempengaruhi di antara negara-negara yang terletak di kawasan; dari sini teoretisi interdependensi berargumen bahwa semakin tinggi tingkat interdependensi di antara negara-negara di kawasan semakin besar peluang bagi berhasilnya proses integrasi regional.¹⁰ Pengalaman integrasi Eropa yang selama ini dijadikan model integrasi oleh banyak pengkaji integrasi (baik Transaksionalisme, Konstruktivisme-sosiologis, Fungsionalisme, Neofungsionalisme maupun Interdependensi kompleks) menunjukkan betapa pentingnya faktor intra-regional tersebut.

Paparan teoritis integrasi seperti ini menunjukkan titik kuat integrasi bersifat endogeneous. Dari argumentasi ini hipotesa awal yang dapat dikembangkan adalah faktor eksternal justru berpotensi membawa kemungkinan ‘pelemahan’ integrasi regional. Mengikuti argumentasi teoretisi integrasi seperti ini, interregionalisme justru menjadi penghambat bagi proses integrasi regional.

Bila argumentasi ini diikuti, kajian atas interregionalisme menjadi sangat menarik. Proses integrasi regional, terutama sejak berakhirnya perang dunia terjadi dalam konteks globalisasi yang sangat dinamis dan terbuka. Globalisasi bukan saja “menghapus” batas-batas negara melalui terciptanya *borderless world*, namun juga membuat ‘batas-batas’ regionalitas menjadi sangat kabur. Negara-negara di kawasan manapun kini dapat berhubungan dengan negara-negara lain di luar kawasan mereka. Interaksi lintas batas kawasan seperti ini memunculkan tantangan serius tersendiri bagi inisiatif integrasi regional yang muncul di kawasan tertentu seperti ASEAN. Interregionalisme adalah konsekuensi faktual dari menguatnya globalisasi.

Tentu saja menjadi suatu tantangan tersendiri bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang saat ini sedang dalam proses membangun komunitas ASEAN. Sejarah hubungan internasional di kawasan ASEAN lebih banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor yang bersifat ekstra-regional terutama sejak bangsa-bangsa Eropa dan Amerika menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah koloni mereka. Weatherby (2009) menggambarkan bahwa selama beberapa abad bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara terus berjuang untuk memiliki otonomi dalam hubungan internasional: otonomi

Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional, Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 156.

⁹ David Mitrany (1948). “The Functional Approach to World Organization”. *International Affairs*, Vol. 24, No. 3 Juli 1948; David Mitrany (1966). *A Working Peace System*. Chicago: Quadrangle Books; dan Ernst Haas, *The Uniting of Europe*, Stanford, CA: Stanford University; Ernst Haas, (1975). *The Obsolete of Regional Integration Theory*, Monograph, Berkeley: California University. Lihat juga Yulius P Hermawan (2007), *Ibid.* hal. 153-156.

¹⁰ Keohane, R. (1987). “Power and Interdependence”. *International Organization*. Vol. 41, No. 4 hal. 725-753.

menentukan posisi mereka di kawasan maupun terhadap isu-isu ekstra kawasan. Masyarakat Asia Tenggara saat ini lebih mengenal sejarah hubungan bangsanya dengan masyarakat Eropa (dan dalam kasus Philipina, dengan Amerika Serikat) daripada sejarah hubungan dengan bangsa-bangsa intra kawasan.

Proses integrasi regional yang berjalan seiring dengan interregionalisme menunjukkan suatu fakta baru bahwa interaksi dengan bangsa-bangsa non ASEAN adalah suatu yang tidak terelakkan. Penelitian ini mencoba membangun proposisi baru untuk melihat hubungan positif (jika ada) antara interregionalisme (sebagai *unavoidable fact*) dan integrasi regional. Secara hipotetis disusun proposisi sandingan untuk melihat potensi positif dari hubungan keduanya: faktor eksternal seperti yang dibawa melalui interregionalisme dapat memperkuat integrasi regional bila sejumlah kondisi dapat dipenuhi: seperti negara-negara di kawasan mampu menjadikannya pendorong untuk merumuskan posisi bersama menyikapi aktor ekstra-kawasan dan perilakunya. Kajian tentang interregionalisme dan integrasi regional mau tidak mau harus melihat aktivitas-aktivitas yang dikembangkan aktor-aktor interregional dalam kerangka interregionalisme dan menilai apakah aktivitas-aktivitas tersebut kontributif terhadap proses integrasi ASEAN.

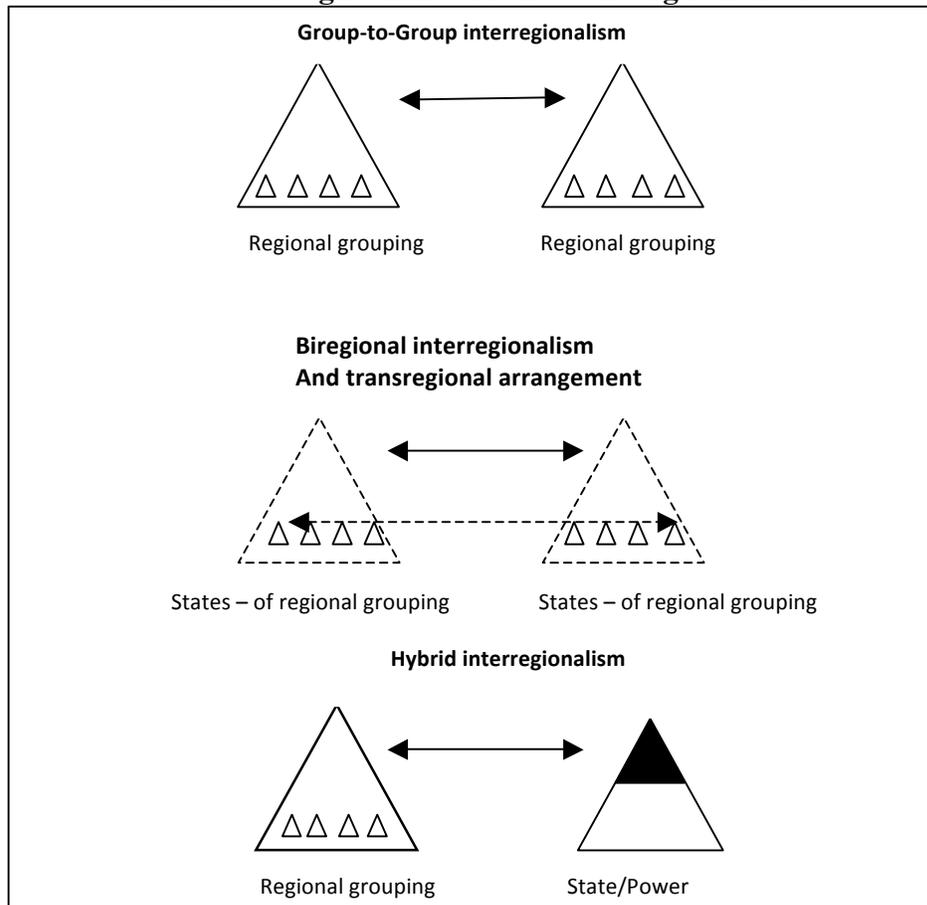
2.2. Aspek utilitas-fungsional Interregionalisme bagi komunitas regional

Interregionalisme telah menjadi kajian yang cukup penting bagi peminat kajian kawasan dan organisasi internasional. Berbagai perspektif dikembangkan untuk memahami trend interregionalisme ini dengan merujuk pada praktik empirik di antara organisasi regional yang ada. Untuk memahami lebih jauh tentang hubungan interregionalisme dan integrasi regional bagian ini akan mengkaji lebih mendalam konsepsi interregionalisme dan membangun kerangka konseptual untuk memaparkan ragam kerjasama interregional yang telah dibangun ASEAN sebagai institusi inter-state kolektif dan negara-negara anggota ASEAN dalam kapasitas individual masing-masing.

Pendefinisian konsepsi interregionalisme cukup beragam. Keberagaman ini menunjukkan bahwa sekalipun fenomena ini cukup atraktif untuk diteliti, namun perspektif yang memadai untuk memahaminya belum mencukupi; belum ada pendefinisian yang baku tentang interregionalisme. Beberapa pengkaji mendefinisikan transregionalisme sebagai salah satu jenis dari interregionalisme; pengkaji lain membedakan interregionalisme dan transregionalisme dengan pemaknaan yang berbeda.

Hanggi (2000: 3) mengidentifikasi tiga bentuk *interregional arrangement* (interregionalisme), yaitu: (1) *relations between regional groupings* atau *group-to-group interregionalism* seperti kemitraan dialog antara UE dan ASEAN; (2) *biregional and transregional arrangement*; (3) *hybrid interregionalism* seperti hubungan antara pengelompokan regional dan satu negara yang memiliki power besar dalam politik internasional.

Gambar 1. Tiga macam bentuk interregionalisme



Sumber: Diadaptasi dari Charalambos Tsardanidis, “The BSEC: From New Regionalism to Inter-regionalism,” *Angora without Fronties*, Vol. 10 (4), 2005, hal. 378.

Gambar 1 merupakan model penyederhaan dari tiga macam bentuk interregionalisme. Bentuk yang pertama adalah *group-to-group interregionalism* di mana organisasi regional yang dibentuk oleh beberapa negara di kawasan tertentu menjalin kemitraan dialog dan kerjasama dengan organisasi regional dari kawasan lain. Masing-masing aktor yang terlibat kurang lebih akan bertindak sebagai bagian dari organisasi regional di mana mereka berafiliasi.

Bentuk kedua dari interregionalisme adalah *bioregional interregionalism* dan *transregional interregionalism*. Berbeda dengan bentuk *group-to-group interregionalism*, aktor-aktor yang terlibat dalam *biregional and transregional arrangement* bersifat lebih heterogen dan ‘difuse’. Bentuk ini melibatkan aktor-aktor dari dua atau lebih kawasan, namun arrangement-nya tidak selalu terkait dengan keberadaan organisasi regional yang ada. Sekalipun dalam beberapa aktivitas terdapat upaya koordinasi di bawah payung organisasi regional tertentu, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama biregional dan transregional ini tetap bertindak dalam kapasitas individualnya. Contoh dari bentuk interregionalisme kedua ini adalah APEC (*transregional arrangement*), ASEM (biregional

arrangement), Europe-Lation America Rio Summit (*biregional endeavor*), dan East Asia-Latin America Forum (EALAF – transregional arrangement).

Jenis ketiga yang disebut *hybrid* adalah hubungan yang melibatkan pengelompokan regional dengan satu negara super power maupun *middle power*. Contoh dari interregionalisme hybrid adalah hubungan EU-Russia, EU China, EU-Jepang, EU Korea, ASEAN-Russia, ASEAN-USA, ASEAN-Kanada, ASEAN-India, ASEAN-Australia dan ASEAN-Selandia Baru.

Berangkat dari kajian Hanggi, Valle (2008) mengidentifikasi lima macam bentuk interregionalisme, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1. Kajian ini lebih menunjukkan betapa kayanya pemaknaan dari fenomena interregionalisme.

Tabel 1. Tipologi Interregionalisme

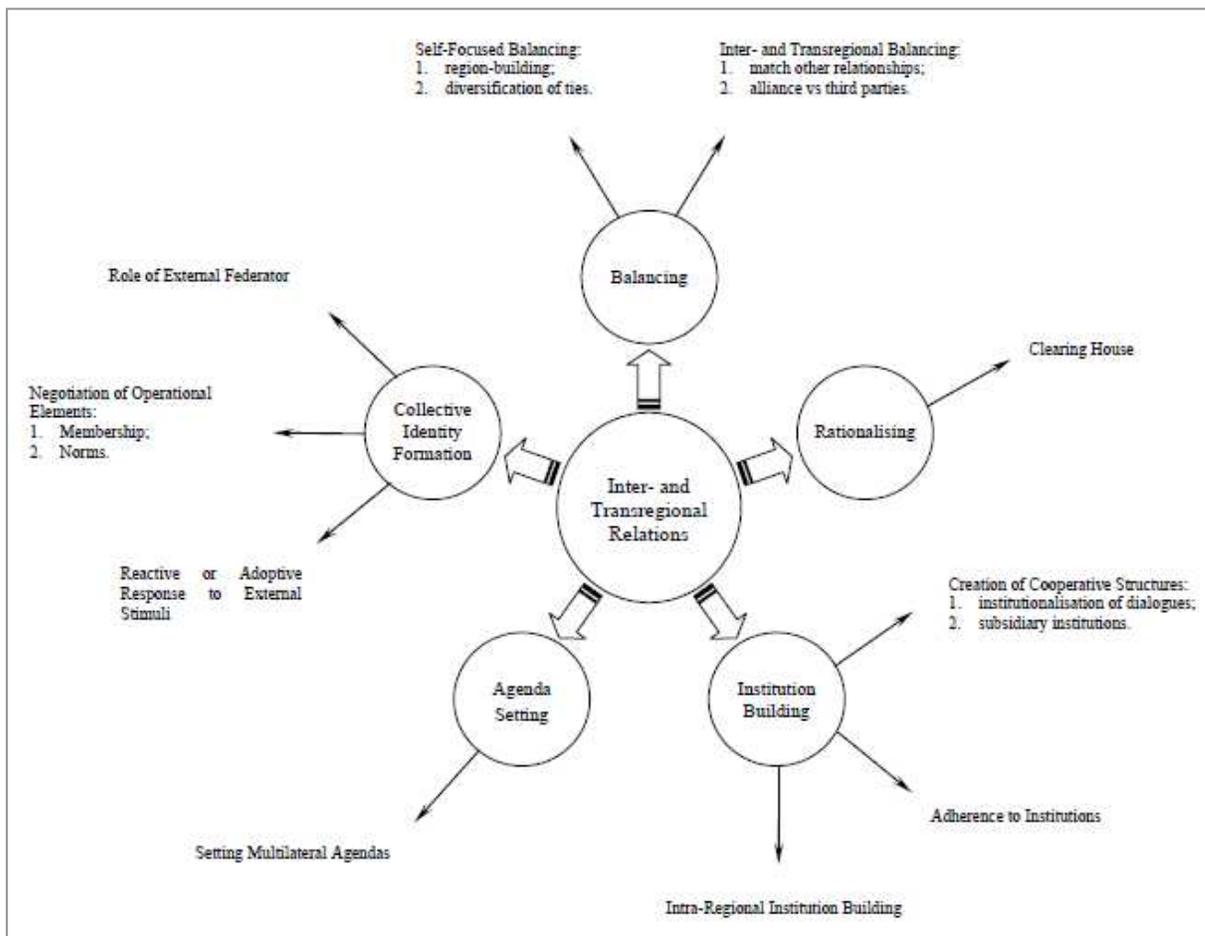
No	Region A	Region B	Type of interregionalisme
1	Organisasi regional	Organisasi regional	Organisation-to-organisation interregionalism
2	Organisasi regional	Regional Group	Organisation-to-group interregionalism
3	Regional Group	Regional Group	Group-to-group interregionalism
4	Organisasi regional beranggotakan Negara-negara dari dua kawasan atau lebih		Transregionalisme (<i>interregionalisme dalam pengertian luas</i>)
5	Organisasi regional Atau kelompok regional	Negara	Hybrid-interregionalisme atau Quasi hubungan interregional (<i>interregionalisme dalam pengertian luas</i>)

Sumber: Diadaptasi dengan pengembangan oleh peneliti dari Valeria Marina Valle (2008) *Interregionalism: A Case Study of the European Union and Mercosur*, GARNET Working Paper No: 51/08, University of Mexico, July 2008; dan Heiner Hanggi (2000): *Interregionalism: empirical and theoretical perspective*.

Kajian fungsi interregionalisme telah dilakukan oleh Doidge (2007) yang mengembangkan pendekatan fungsional untuk melihat peran interregionalisme dan transregionalisme. Menurutnya ada lima peran interregionalisme dan transregionalisme, yaitu: (1) *Balancing*; (2) *collective identity formation*; (3) *Agenda Setting*; (4) *Institution building*; dan (5) *Rationalising*. Peran *Balancing* didasarkan pada konsepsi Realisme tentang kompetisi di antara aktor yang terlibat; interregionalisme mendorong aktor-aktor untuk menciptakan keseimbangan antar kawasan, untuk memelihara ekuilibrium dalam sistem internasional.

Peran *Institution building* terkait erat dengan pembentukan norma-norma dan institusi baik di masing-masing organisasi regional maupun di antara dua organisasi regional yang terlibat dalam hubungan interregional/transregional. Peran *institution building* mencakup tiga fungsi yaitu *intra-regional institution building*; *adherence to institution*; dan *creation of cooperative structure* yang mencakup institusionalisasi dialog dan institusi-institusi subsider.

Gambar 2. Lima Fungsi Interregionalisme



Sumber: Mathew Doidge, *From Developmental Regionalism to Developmental Interregionalism. The European Union Approach*. NCRE Working Paper No. 07/01, July 2007.

Peran *rationalising* mendefinisikan dialog interregional sebagai “*potential clearing house for global multilateral fora*”. Peran *Agenda Setting* terkait erat dengan peran rasionalisasi, tetapi melibatkan penetapan agenda kolektif ditingkat interregional yang kemudian akan diekspresikan dalam negosiasi-negosiasi di tingkat global.

Fungsi pembentukan identitas kolektif terkait dengan Interregionalisme dalam membantu pembentukan identitas regional, yang penting sebagai fondasi dari integrasi regional dan munculnya komunitas keamanan regional.

Bab III. Metode Penelitian

3.1. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan riset kualitatif. Penelitian ini akan mengumpulkan informasi, mempelajari dokumen-dokumen resmi, mewawancari sejumlah narasumber dan mengkombinasikannya dengan data-data sekuder yang dipublikasikan dalam media massa. Semua data akan dianalisa dan ditulis dalam laporan deskriptif dalam suatu kerangka teoretis.¹¹

Responden, pengelompokan regional dan perspektif negara akan dikategorikan dalam kategori track satu dan dua. Track satu meliputi narasumber dan sumber-sumber resmi seperti dokumen resmi dari negara-negara anggota ASEAN, perwakilan mitra interregional ASEAN seperti Uni Eropa dan anggota Uni Eropa, SAARC, SPF, Mercosur dan Group Rio seperti juga negara-negara anggota APEC. Track kedua meliputi sumber-sumber dari media massa, analisis para ilmuwan dan beragam working papers yang telah dipublikasikan. Tabel 3. Merangkum sumber-sumber dan teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini.

Tabel 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

No.	First track resources dan strategi riset	Second track resources
1.	Pandangan dari perwakilan negara-negara anggota ASEAN (diperoleh melalui wawancara dan atau teks pidato resmi)	Reliable printed and electronic mass media's news (tringualism- validity cross-check)
2.	Pandangan dari perwakilan Uni Eropa dan negara anggota Uni Eropa (diperoleh melalui wawancara, teks pidato dan laporan pelaksanaan projek/program)	Scholars' analysis – journal articles and working paper (critical assesment)
3.	Pandangan negara mitra interregional (melalui wawancara dan teks pidato)	Observers' short opion in the mass media
4.	Pandangan perwakilan mitra interregional SAARC, Mercosur dan Group Rio (melalui wawancara, teks pidato dan laporan)	
5.	Official statements, delegate interventions, position papers yang dipresentasikan dalam forum-forum regional dan interregional (documentary studies)	
6.	Official websites (documentary studies)	

¹¹ Audie Klotz dan Deepa Prakash (2009), *Qualitative Methods in International Relations A Pluralist Guide*. Basingstoke: Palgrave MacMillan; Laura Roselle dan Sharon Spray (2008)/ *Research and Writing in International Relations*. New York: Pearson Longman.

Penelusuran dokumen-dokumen yang telah dibuat ASEAN dan informasi pendukung telah dilakukan peneliti untuk melihat hubungan antara interregionalisme dan pembentukan komunitas ASEAN. Sejumlah wawancara telah dilakukan peneliti dengan perwakilan dari partner interregional ASEAN, yaitu Duta besar Brazil, Duta Besar Argentina, Duta Besar India, Duta Besar Jerman, Perwakilan Uni Eropa. Peneliti juga telah menghadiri diskusi dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk mendengar progress yang telah dicapai ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia. Tiga pertanyaan umum diajukan kepada para narasumber: (1) bagaimana mereka melihat pentingnya ASEAN sebagai mitra kerjasama interregional; (2) bagaimana mereka melihat penguatan institusi ASEAN; (3) bagaimana mereka melihat pentingnya forum interkawasan bagi negara mereka, organisasi regional mereka?

Wawancara secara informal juga telah dilakukan dengan sejumlah staf ASEAN dan pejabat kementerian luar negeri di kantor kementerian luar negeri Republik Indonesia. Wawancara dengan narasumber ini lebih dititikberatkan untuk melihat bagaimana Indonesia sebagai anggota ASEAN menilai penguatan ASEAN. Presentasi dan diskusi dengan kolega yang memiliki minat akan kajian ASEAN dan interregionalisme dilakukan untuk memperdalam analisis peneliti sehingga kesimpulan yang ditarik memiliki nilai validitas dan argumentatif.

3.2. Kerangka Teoretis

Penelitian kualitatif ini mengikuti pendefinisian yang dikembangkan oleh Julie Gilson. Julie Gilson (2002) mendefinisikan Intreregionalism dalam hubungannya dengan kajiannya tentang the Asia-Europe Meeting (ASEM).¹² Interregionalisme adalah “dialog antara satu kawasan dengan kawasan lain”. Region (kawasan) menjadi aktor sentral dalam interregionalisme, sementara transregionalisme adalah ”upaya struktural untuk merangkul sejumlah negara dalam satu kerangka tunggal yang koheren (*a structural attempt to combine a range of states within a coherent unified framework*). Aktor sentral dalam transregionalisme adalah negara, bukan kawasan di mana negara tersebut berada secara geografis.

Pendefinisian ini mengantar pada pemikiran asuntif-hipotetis-konseptual. Pertama baik interregionalisme maupun transregionalisme dapat berimplikasi negatif bagi pembangunan institusi regional dalam prekondisi-prekondisi tertentu.

Dalam konteks interregionalisme, suatu organisasi regional seperti ASEAN yang memiliki (sedang mengembangkan) identitas regionalnya harus melakukan sejumlah adaptasi dengan norma-norma baru yang telah diadopsi oleh organisasi *counter-part*-nya (misal Uni Eropa, SAARC, Mercosur, SPF, dll). Adaptasi ini akan merusak institusi regional tersebut bila norma-norma tersebut bertentangan dengan kerangka nilai yang sudah disepakati di antara anggota ASEAN. Adaptasi ini tentu saja membutuhkan waktu dan menyerap energi anggota-anggotanya untuk melalui suatu ‘negosiasi’ yang alot.

¹² Julie Gilson (2002). *Defining Inter-Regionalism: The Asia-Europe Meeting (ASEM)*. SEAS Electronic Working papers. Volume 1, No. 1.

Argumentasi mengapa transregionalisme dapat berimplikasi negatif jauh lebih mudah untuk dipahami secara konseptual. Dalam konteks transregionalisme, setiap anggota bersifat otonom, memiliki otoritas yang lebih independen untuk mengekspresikan posisi mereka, termasuk untuk berbeda pendapat dengan organisasi regional dimana mereka menjadi anggotanya. Negara boleh mengambil garis pendirian yang sejalan dengan organisasi regional mereka namun dapat pula mengambil posisi yang berbeda dengan mempertimbangkan kepentingan nasional yang dapat mereka perjuangkan melalui wadah transregional tersebut. Bila negara-negara memilih untuk mengedepankan kepentingan nasional mereka, institusi regional menjadi dikesampingkan. Transregionalisme dengan demikian dapat dipakai untuk menguji seberapa kuat institusi regional telah terbangun. Bila telah terbangun solid, negara-negara anggotanya akan memakai kerangka regional sebagai acuan untuk bertindak dalam konteks transregionalisme.

Kajian tentang transregionalisme yang berdampak negatif misalnya dibuat oleh Heiner Hanggi (2000: 12) yang berargumen bahwa pembentukan APEC dilatar-belakangi oleh kepentingan Amerika Serikat yang tidak menghendaki pembentukan blok regional di Asia Timur; di mata Amerika Serikat dan negara-negara yang sealiran, APEC menjadi “*safeguard against the creation of a regional bloc in East Asia*”.¹³

Pemikiran kedua dari hasil penelusuran teoretis adalah bahwa interregionalisme mungkin memberi peluang yang lebih baik bagi penguatan institusi regional jika dibandingkan dengan transregionalisme. Pendekatan dalam membangun interregionalisme tetap berangkat dari kerangka regionalisme: setiap aktor memandang negara-negara yang terlibat dalam interregionalisme sebagai bagian dari suatu institusi regional sehingga tindakan mereka ‘harus’ mengacu pada kerangka yang ada tersebut. Dalam hal ini interregionalisme akan dilihat sebagai faktor eksogenous yang bersifat positif bagi penguatan institusi regional.

Bagaimana kita dapat melihat hubungan interregionalisme dan transregionalisme dengan penguatan institusi regional ASEAN? Perspektif utilitas-fungsional yang dikembangkan Doidge (2007) menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini. Perspektif ini melihat beragam fungsi potensial interregionalisme dan transregionalisme (lihat kajian Pustaka).

Kerangka yang dikembangkan Gilson lebih lanjut membantu untuk memahami lebih mendalam bagaimana interregionalisme mungkin membantu (atau justru mengganggu) pembangunan institusi ASEAN. Menurut Gilson ada tiga konsepsi kunci dalam interregionalisme yaitu institusi, pembangunan identitas dan diskursus. Institusi lebih dipahami sebagai “*regularized channels of communication among state representatives acting in accordance with obligations set out in treaties or declaration*”. Institusi tidak semata-mata ditandai dengan lokasi fisik seperti markas besar. Gilson lebih lanjut mengembangkan perspektif Ruggie tentang tiga level institusionalisasi: (1) *cognitive*

¹³ Heiner Hanggi (2000). *Interregionalism: empirical and theoretical perspectives*, paper dipersiapkan untuk lokakarya: “Dollars, Democracy and Trade: External Influence on economic Integration in the Americas”, 18 Mei 2000, the Pacific Council on International Policy Los Angeles dan the Center for Applied Policy Research, Munich.

level (dimana komunitas epistemic berada); 2. level ekspektasi mutual (seperti dituangkan dalam aturan-aturan dan norma-norma); dan (3) level organisasi internasional formal.

Pembangunan identitas menurut Gilson terkait erat dengan pertanyaan fundamental bagaimana “region” mengidentifikasi identitasnya dalam kontek keterikatan interregional. Dalam kontek interregionalisme, negara berperilaku seolah-olah sebagai suatu “region” vis-à-vis negara-negara lain yang mereka persepsikan akan berperilaku serupa sebagai suatu region yang lain.

Konsepsi ketiga yang penting untuk memahami interregionalisme dan implikasinya terhadap penguatan institusi ASEAN adalah diskursus yang dikembangkan bersama-sama diantara dua region yang berbeda. Gilson menilai jika proses integrasi Uni Eropa menjadi simbol regionalisasi, Asia menunjukkan suatu bentuk kawasan yang belum sempurna atau belum paripurna (*imperfect or incomplete form of region*) hingga proses yang telah berlangsung di Eropa juga terjadi di kawasan Asia. Heiner Hanggi berargumentasi bahwa interregionalisme (seperti ASEM) dapat dipakai sebagai suatu “*deliberate strategy*” untuk mempromosikan identitas regional Asia, khususnya ASEAN. Dengan demikian, interregionalisme dapat membantu munculnya diskursus tentang “*East Asianness*” (ke-Asia Timuran).

Berdasarkan kerangka berpikir ini, penelitian ini melihat bagaimana *group-to-group interregionalism*, *biregional-interregionalism* dan *transregional arrangements*, serta hubungan ASEAN dan negara mitra dialog (negara partner interregional) dan kontribusinya pada proses *institution building* dan pembentukan komunitas ASEAN.

Bab IV. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan presentasi proposal penelitian dalam Regional Workshop on Southeast Asian Studies di Universitas Thammasat di Bangkok tanggal 4 Juli 2011 dan dilanjutkan dengan diskusi rancangan penelitian di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unpar tanggal 2 Agustus 2011. Persiapan penelitian lapangan untuk wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen dilakukan di sepanjang bulan Agustus 2011- September 2011. Wawancara face-to-face dengan narasumber terpilih dan diskusi dalam berbagai forum ASEAN dilakukan di bulan Oktober dan Nopember 2011. Di bulan Desember 2011, penelusuran dokumen dan kajian atas masukan-masukan yang diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan sekaligus dimulainya penulisan laporan penelitian. Laporan awal diselesaikan pada 23 Maret 2012. Laporan ini dipresentasikan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP tanggal 3 April 2012.

Tabel 3. Pelaksanaan Penelitian

Bulan	Juli 2011	Agustus 2011		September 2011	Oktober-Nopember 2011	Desember 2011-Maret 2012	April 2012		Mei '12	
Minggu	4 th	2 nd	3 rd	1 st -4 th	Seluruh minggu	1 st -4 th	1 st	2 nd	3 rd	
AGENDA	Presentasi Concept note dalam Regional Workshop – Bangkok	Presentasi Research Proposal di Jurusan HI FISIP Unpar	Penyerahan proposal riset ke LPPM UNPAR untuk pendanaan	Fieldwork: Interview, browsing, documentary studies	Field work: Interviews, Categorizing Data	Analysis Data dan Transcript of Interviews	Penulisan laporan penelitian	Presentasi laporan penelitian di Jurusan HI FISIP Unpar; penulisan kembali laporan akhir	Penyerahan ke LPPM	Presentasi laporan penelitian di Universitas Thammasat Bangkok
Output/process	CONCEPT NOTE	RESEARCH PROPOSAL		FIELD WORK	FIELD WORK & ANALYSIS		REPORT WRITING	PRESENTATION & FINAL REPORT		

Bab V. ASEAN, Interregionalisme dan Integrasi Regional (Hasil dan Pembahasan)

Bab V akan memaparkan hasil penelitian dan temuan-temuan penelitian. Pertama akan mendeskripsikan beragam tipe interregionalisme yang dikembangkan ASEAN dan anggotanya, kemudian akan dieksplorasi kontribusi interregionalisme terhadap *institution building* dan komunitas ASEAN.

Kerjasama ASEAN dengan negara partner dialog dan *regional groupings* memiliki sejarah yang sudah cukup panjang sejak tahun 1970an ketika ASEAN baru menginjak usia satu dekadanya. Pada periode ini ASEAN telah mulai mengembangkan kerjasama dengan Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Kerjasama ini diakui semakin penting sejak cita-cita untuk membentuk komunitas ASEAN dicanangkan di tahun 2003. Peran partner dialog ini diakui penting seperti yang secara eksplisit dikemukakan oleh kepala hubungan eksternal, Sekretariat ASEAN:

*“The key goals of ASEAN’s external relations then were three-folds --secure technical assistance for regional cooperation projects; promote trade and economic relations; and strengthen political relations with third countries and regional groupings.”*¹⁴

Kerjasama interregional dengan partner dialog mendapatkan tempat yang semakin signifikan dalam KTT ASEAN ke-19 di Bali. Kerjasama ini, menurut pemimpin-pemimpin ASEAN sangat penting untuk membantu pencapaian ASEAN community tahun 2015.

5.1. Ragam tipe interregionalisme ASEAN

ASEAN sebagai *regional grouping* telah terlibat dalam kerjasama interregional dengan beragam aktor lain (baik regional grouping, maupun negara berpengaruh) di luar Asia Tenggara. Negara-negara anggotanya juga telah mengembangkan kerjasama interregional dalam wadah interregional/transregional seperti APEC dan BIMSTEC.

¹⁴“*ASEAN’s Strategy towards its dialogue Partners and ASEAN Plus Three Process*”, disampaikan oleh S Pushpanathan, Kepala, Hubungan Eksternal, Sekretariat ASEAN, pada ASEAN COCI Seminar on ASEAN new issues and Challenges, di Hanoi, 3-4 Nopember 2003. <http://www.asean.org/15397.htm> diakses tanggal 14 Maret 2012.

Table. 4. Kerjasama interregional ASEAN dan atau anggota ASEAN

Kawasan Aktor (Tipe)		Eropa (Eurasia)	Asia Timur	Asia Selatan dan Barat	Amerika Selatan	Amerika Utara	Oseania
ASEAN (<i>group to group interregionalism</i>)		ASEAN- Uni Eropa	-	ASEAN- SAARC ASEAN- GCC	ASEAN- Mercosur ASEAN-Rio Group	-	ASEAN- CER ASEAN- SPF
ASEAN (biregional arrangement)	Biregional grouping arrangement Negara-negara anggota dan ASEAN sekretariat,	ASEM	<i>ASEM</i>	ASEM			ASEM
	(Transregional arrangement) Negara-negara anggota ASEAN bertindak di luar kerangka ASEAN			<i>BIMSTEC</i>	APEC FEALAC	APEC	APEC
ASEAN (Hybrid Inter-regionalism)		ASEAN- Rusia	ASEAN- China ASEAN- Jepang ASEAN- Korea Selatan	ASEAN- India ASEAN- Pakistan		ASEAN-AS ASEAN- Kanada	ASEAN- Australia ASEAN- Selandia Baru

Sumber: dikembangkan lebih lanjut dari Heiner Hanggi (2000) dan penambahan data oleh peneliti dari dokumen-dokumen ASEAN dalam <http://www.asaeansec.org>

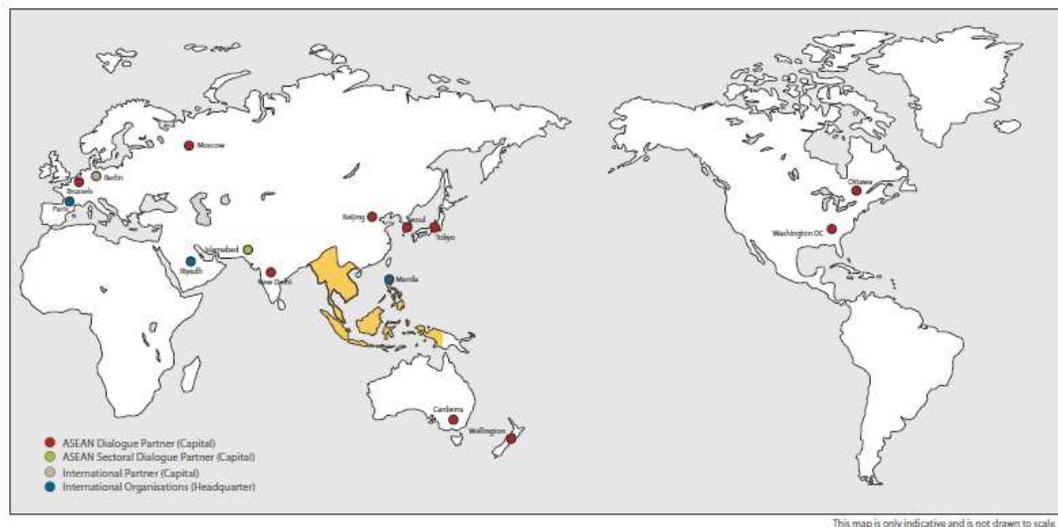
Setidaknya dapat diidentifikasi tiga tipe interregionalisme yang telah dikembangkan oleh ASEAN dan atau negara-negara anggotanya. Tabel 4 merangkum beragam inisiatif kerjasama interregionalisme yang melibatkan ASEAN sebagai organisasi regional dan atau negara-negara anggota ASEAN di luar wadah ASEAN. Tipe pertama adalah *group-to-group interregionalism*. Termasuk dalam tipe ini adalah kerjasama ASEAN-Uni Eropa, kerjasama ASEAN-SAARC, kerjasama ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC),

Kerjasama ASEAN-Mercosur, Kerjasama ASEAN-Rio Group, Kerjasama ASEAN dan Australia New Zealand Closer Economic Relations (CER), dan kerjasama ASEAN dan South Pacific Forum (SPF). Tipe kedua adalah *biregional arrangement* seperti yang saat ini berkembang dalam wujud ASEM, APEC dan BIMSTEC.

Tipe kedua dari interregionalisme disebut dengan *biregionalism and transregional arrangement*. Asian European Meeting (ASEM) merupakan contoh interregionalisme yang bersifat biregional. Asia Pacific Economic Cooperation merupakan contoh interregionalisme yang bersifat transregional.

Tipe ketiga interregionalisme yang dikembangkan ASEAN adalah *hybrid interregionalism*.¹⁵ Seperti ditunjukkan dalam Tabel 2, ASEAN telah mengembangkan kerjasama dengan Rusia di Eurasia, China, Jepang dan Korea Selatan di Asia Timur, India dan Pakistan di Asia Selatan, Amerika Serikat dan Kanada di Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru di Pasifik Selatan/Oseania. KTT ASEAN ke-19 di Bali, mengakui pentingnya keberlanjutan kerjasama ini dan berkomitmen untuk terus mengembangkan kerjasama ini. Kerjasama ASEAN dengan individu negara ini dikembangkan di luar struktur interregional yang sudah ada seperti APEC dan East Asia Summit.

Gambar 3. ASEAN dan Partner Interregional



Sumber: the ASEAN Secretariat. *ASEAN in the Global Community, Annual Report 2010-2011*, Jakarta: ASEAN Secretariat, July 2011.

¹⁵ Diluar ketiga tipe tersebut ASEAN juga memiliki inisiatif untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara non anggota ASEAN dalam forum regional seperti ASEAN Plus Three (APT), ASEAN Regional Forum (ARF), dan East Asian Summit (EAS). Peneliti dalam ini tidak memasukan kerjasama ini dalam kategori interregionalisme ini. Forum ini lebih dilihat sebagai aktivitas ASEAN dalam mewujudkan visi dan misinya.

5.1.1. *Group to group Interregionalism*

Group-to-group interregionalism adalah kerjasama interregional yang dikembangkan oleh dua organisasi yang berbeda kawasan. Termasuk dalam tipe ini adalah Kerjasama ASEAN dan Uni Eropa, kerjasama ASEAN dan Closer Economic Relations (CER), dan Kerjasama ASEAN dan Gulf Cooperation Council (GCC). Lebih lanjut akan dipaparkan beberapa bentuk kerjasama interregional yang telah dijalin ASEAN sebagai *regional grouping* maupun anggota-anggota ASEAN dengan regional grouping lain atau melalui organisasi interregional dan transregional.

Kerjasama ASEAN-Uni Eropa

Komunitas Ekonomi Eropa (EEC/ sekarang Uni Eropa) merupakan partner dialog pertama yang membangun kerjasama dengan ASEAN. Kerjasama interregional ini dibentuk tahun 1972 melalui komite koordinasi khusus ASEAN (SCCAN/Special Coordinating Committee of ASEAN).¹⁶ Untuk memperkuat kerjasama, dibentuklah ASEAN-EEC joint Study Group yang bertugas mengkaji upaya-upaya koordinatif di antara dua kawasan pada bulan Mei 1975. Pada tahun 1977, ASEAN memiliki kepentingan untuk merespon ‘proteksionisme’ yang dikembangkan oleh negara-negara anggota EEC; kepentingan ini mendorong ASEAN untuk memformalkan kerjasamanya dengan EEC. Pertemuan tingkat menteri di antara kedua kawasan dilakukan sejak September 1978 di Brussel. Hubungan ASEAN-EEC dilembagakan pada bulan Maret 1980 dengan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama EC-ASEAN pada pertemuan tingkat menteri kedua kawasan di Kuala Lumpur. Tujuan kerjasama tersebut mencakup kerjasama komersial, ekonomi dan teknikal.

Intensitas kerjasama ASEAN EU ditingkatkan pada tahun 1994 dengan pembentukan ad hoc Eminent Persons Group (EPG) dengan anggota-anggota yang diangkat dari kedua wilayah dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan komprehensif bagi kerjasama politik, keamanan, ekonomi dan budaya.

Kerjasama ASEAN-EU diperkuat lagi dengan penetapan the New Asia Strategy pada tahun 1994 dan deklarasi bahwa ASEAN akan tetap menjadi *cornerstone* dalam dialog UE dengan negara-negara di Asia. Dari sini dibentuklah ASEM yang diresmikan di Bangkok pada bulan Maret 1996 melalui KTT ASEM yang pertama. Pada tahun 1997, pembentukan the Asia-Europe Foundation (ASEF) di Singapura menjadi langkah penting baru. ASEF bertujuan memperkuat hubungan antara masyarakat Eropa dan Asia dan mengembangkan hubungan institusional antara Asia dan Eropa.

Di bidang ekonomi, kerjasama memiliki nilai penting. UE adalah pasar ekspor terbesar kedua dan partner dagang terbesar ketiga setelah Jepang dan Amerika Serikat (pada tahun 1995). Perdagangan ASEAN dan UE yang bertumbuh sekitar 31,5% memberikan indikasi bahwa pasar ASEAN semakin penting di mata Uni Eropa. Dalam sektor investasi, FDI UE meningkat 13,1 % dari 35 milyar dolar AS di tahun 1993 menjadi 39,5 milyar dolar AS di tahun 1994.

¹⁶ <http://www.aseansec.org/5612.html> diakses tanggal 25 Januari 2012.

UE telah menjadi partner interregional penting dalam mendukung perwujudan komunitas ekonomi ASEAN (detil akan didiskusikan di bagian selanjutnya). Bantuan teknis mencakup proyek riset, beasiswa, survey, *studies and familiarization tours*, seminar-seminar, lokakarya, pelatihan-pelatihan dan cara-cara promosi perdagangan dan ekspor. Bidang teknis ini mencakup perdagangan, industri, keuangan dan perbankan, mineral dan energi, pertanian dan kehutanan, transportasi dan komunikasi, pembangunan sosial, pembangunan sumberdaya manusia dan kontrol narkoba. Secara khusus, UE membantu ASEAN dalam membangun the ASEAN Custom Institute for Training and Research (ACITAR), the ASEAN-EC Energy Management Training and Research Centre (AEEMTRC), the ASEAN Timber Industry Research and Development Center dan the ASEAN-EC management Center.

Uni Eropa mendukung pengembangan dan implementasi ASEAN Project for Regional Integration Support (APRIS). Proyek ini dimaksudkan untuk membuka jalan bagi dialog kebijakan di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dan juga bagi kajian bersama tentang integrasi ekonomi.

Kerjasama ASEAN-Closer Economic Relations (CER)

Kerjasama ASEAN dan CER fokus pada kerjasama ekonomi terutama di bidang perdagangan. Ini terkait dengan inisiatif pembentukan ASEAN-Australia dan New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) di antara dua free trade area yang mulai muncul sejak tahun 2002. Namun demikian kerjasama antara masing-masing negara anggota CER dalam kapasitas individual dan ASEAN sudah berlangsung sejak 1970an (lihat bagian *hybrid interregionalism*).¹⁷

AANZFTA diimplementasikan sejak bulan Januari 2010 melalui kerangka regional dalam utilisasi preferensi tarif bagi tujuh negara anggota ASEAN yang terikat dalam kesepakatan FTA.¹⁸ Pada pertemuan Konsultasi ke-16 di Manado pada bulan Agustus 2011 menteri-menteri ekonomik ASEAN dan Australia dan Selandia Baru melihat kemajuan penting dalam kerjasama ini. Diidentifikasi sejumlah proyek kerjasama seperti *in-country training on Rules of Origin* untuk Kamboja dan Laos untuk membantu pegawai pemerintah dan pelaku bisnis dalam memanfaatkan kesepakatan kerjasama; the ASEAN Regional Diagnostic Network on Sanitary and Phytosanitary measures, sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk menciptakan sistem ASEAN dalam *'delivering credible plant pest and disease diagnostic services'*; suatu forum tentang ASEAN Regional Qualifications Framework untuk mendukung perdagangan dalam jasa pendidikan dan *temporary movement of natural persons*; dan lokakarya tentang akses dalam WIPO Madrid Protocol untuk membangun kapasitas di antara negara-negara anggota ASEAN dalam menerapkan komitmen hak karya intelektual.

Pada bulan Juni 2011 diselenggarakan CER-ASEAN Integration Partnership Forum di Kualalumpur. Tujuan forum ini adalah untuk memperkuat dialog antara ASEAN dan Australia dan Selandia Baru menyangkut isu-isu integrasi ekonomi dan konektivitas. Dalam forum ini, ASEAN dapat belajar dari integrasi ekonomi dalam CER dalam upaya

¹⁷ <http://www.aseansec.org/16576.htm> diakses tanggal 6 Maret 2012.

¹⁸ http://www.dfat.gov.au/asean/110813_aem_cer_joint_media_statement.html diakses tanggal 6 Maret 2012.

untuk mencapai komunitas ASEAN 2015. IPF selanjutnya direncanakan pada pertengahan tahun 2012.

Melalui kerjasama ini diterapkan AECSP – AANSFTA dalam jangka 5 tahunan (2010-2014) dengan dana sekitar 20-25 juta dolar Australia. Hingga saat ini telah dimanfaatkan sebesar 3,2 juta, sementara 5,8 juga diperkirakan akan dipakai untuk proyek-proyek baru tahun 2011-2012.

Kerjasama ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC)

Inisiatif kerjasama antara ASEAN dan GCC sudah muncul sejak 1990 ketika ketua Dewan Menteri dalam GCC mengungkapkan keinginan untuk membangun hubungan formal dengan ASEAN. Menteri-menteri luar negeri ASEAN bertemu dengan menlu-menlu dari negara GCC dalam Majelis Umum PBB di New York tahun 1990. Upaya penjajagan dilakukan sejak pertemuan antar menteri-menteri tersebut. Pada tahun 2000, dibentuklah ASEAN Riyadh Committee (ARC) yang berisikan kepala-kepala perwakilan negara-negara anggota ASEAN di ibukota Arab Saudi. Pada tahun 2004, disepakati kerjasama yang lebih kuat antara sekretariat ASEAN dan sekretariat GCC khususnya dalam bidang kesehatan, turisme, makanan halal dan kejahatan transnasional dan terorisme.

Pertemuan tingkat menteri ASEAN-GCC yang pertama akhirnya dilaksanakan di tahun 2009, di Manama Bahrain. Pertemuan ini menghasilkan ASEAN-GCC Joint Vision dan MoU antara sekretariat ASEAN dan Sekretariat GCC. Pada tahun 2010, dicanangkan Rencana Aksi dua tahunan antara ASEAN dan GCC (2010-2012). Rencana Aksi ini mengidentifikasi aktivitas-aktivitas bagi kolaborasi dalam bidang perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan pelatihan, budaya dan informasi, dan konsultasi timbal balik menyangkut masalah-masalah internasional.

Gulf Cooperation Council dibentuk tahun 1981 untuk menciptakan kerjasama ekonomi, ilmiah dan bisnis di antara negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah. GCC beranggotakan enam negara di teluk, yang meliputi: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka menjadi kekuatan minyak dunia karena kemampuannya untuk menyuplai sepertiga dari minyak Amerika Serikat. Arab Saudi merupakan negara terbesar dengan jumlah penduduk 26 juta jiwa; pendapatan perkapita 24.200 dolar AS. Uni Emirat Arab memiliki penduduk 5,1 juta jiwa dengan pendapatan perkapita 49.600 dolar AS. Qatar berpenduduk 848.000 jiwa dengan pendapatan per kapita 179.000 dolar AS. Oman berpenduduk 3 juta jiwa. Kuwait berpenduduk 2,4 juta jiwa dengan pendapat perkapita 48.900 dolar AS. Bahrain berpenduduk 1,2 juta jiwa dengan GDP perkapita 40.500 dolar AS.

5.1.2. *Biregional dan Transregional Arrangement*

Biregional arrangement adalah interregionalisme yang digagas oleh dua organisasi regional namun kemudian berkembang menjadi luas. Anggota-anggota kedua organisasi regional tersebut mengambil bagian aktif di dalam arrangement tersebut. Kerjasama bioregional ini kemudian juga diperluas dengan keikutsertaan negara-negara di luar anggota kedua organisasi tersebut. Dibandingkan dengan bioregional arrangement,

transregional Arrangement bersifat loose dalam pengertian anggota-anggota organisasi regional menjadi anggota pengelompokan regional dalam kapasitas individualnya.

Asian European Meeting (ASEM)

ASEM merupakan forum bioregional yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Asia dan Eropa, yang disebut lebih menggambarkan konteks global baru di tahun 1990an.¹⁹ Inisiatornya adalah Singapura dan Perancis yang pada tahun 1994 melihat pentingnya kerjasama interregional ini dan mengusulkan pertemuan tingkat tinggi di antara pemimpin-pemimpin dari dua kawasan ini. Pada tahun 1994, gagasan ini disambut baik oleh Uni Eropa dengan dikeluarkannya *Towards a New Strategy for Asia* oleh Komisi Eropa, yang menekankan pentingnya untuk memodernisasi hubungan dengan Asia.

Tabel 5. Anggota ASEM (Total 48)

Kawasan		Negara Anggota
Asia	Anggota ASEAN	Brunei Darrussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam + Sekretariat ASEAN
	Non anggota ASEAN	China, Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan, Mongolia
Eropa		Austria, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Siprus, Republik Ceko, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksembourg, Malta, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia + Komisi Eropa
Pasifik		Australia, Selandia Baru
Eurasia		Rusia

Sumber: <http://www.aseminfoboard.org/about-asem-menu.html>

Pertemuan pertama diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada bulan Maret 1996 dan menandai awal kerjasama ASEM. Pada pertemuan ini hadir tujuh negara anggota ASEAN dan 15 negara anggota Uni Eropa, ditambah China, Jepang, Korea Selatan dan Komisi Eropa. Sejak itu pertemuan tingkat tinggi diselenggarakan setiap dua tahun sekali dengan tuan rumah berselang-seling antara negara di Asia dan Eropa. Anggota ASEM pun bertambah pada tahun 2004 dengan masuknya 10 negara anggota baru Uni Eropa dan tiga negara baru anggota ASEAN. Pada tahun 2007, dua anggota baru Uni Eropa bergabung dan ditambah dengan negara-negara Asia (India, Mongolia, Pakistan). Sekretariat ASEAN

¹⁹ <http://www.aseminfoboard.org/history.html> diakses tanggal 6 Maret 2012.

juga resmi bergabung sebagai partisipan pada tahun 2007 ini. Anggota ASEM bertambah lagi pada tahun 2010, dengan bergabungnya Australia, Selandia Baru dan Rusia. Total anggota ASEM menjadi 48 anggota (termasuk Komisi Eropa dan Sekretariat ASEAN).

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

Inisiatif pembentukan APEC bermula dari ide PM Australia, Bob Hawke dalam suatu pidato di Korea bulan Januari 1989. Pada akhir tahun tersebut, dua belas negara bertemu di Canberra, Australia untuk membentuk APEC. Dari tahun 1989 hingga 1992, APEC merupakan dialog di tingkat pejabat senior dan menteri. Namun sejak 1993, ditingkatkan menjadi tingkat kepala negara.

Dua belas negara pendiri meliputi: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Philipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat. Sejak itu negara-negara lain di kawasan mulai bergabung. China, Hongkong, Taiwan (1991); Meksiko dan Papua Nugini (1993), Chile (1994), Peru, Rusia, Vietnam (1998). Tidak semua negara anggota ASEAN bergabung dalam forum ekonomi inter kawasan ini: Myanmar, Laos dan Kamboja.

Tabel 6. Negara-negara anggota APEC

Kawasan	Negara anggota (Total 21)
Asia	Brunei Darussalam, Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand (1989); China, Taiwan (1991); Vietnam (1998)
Amerika Utara dan Selatan	Amerika Serikat, Kanada (1989); Meksiko (1993); Chile (1994); Peru (1998)
Pasifik - Oseania	Australia, Selandia Baru (1989); Papua Nugini (1993)
Eropa - Eurasia	Rusia (1998)

Sumber: <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History.aspx> diakses tanggal 6 Maret 2012.

Seperti ditulis dalam *mission statement*, APEC merupakan forum ekonomi utama Asia Pasifik. Tujuan utamanya adalah “*to support sustainable growth and prosperity in the Asia-Pacific Region.*”²⁰ Negara-negara berkomitmen untuk membangun komunitas Asia Pasifik yang dinamis dan selaras dengan cara mengembangkan “perdagangan yang bebas dan terbuka, investasi, dan mempercepat integrasi ekonomi regional, mendorong kerjasama ekonomi dan teknik, meningkatkan keamanan manusia, dan memfasilitasi lingkungan bisnis yang mendukung dan berkelanjutan.”²¹

Pencapaian APEC di bidang liberalisasi ekonomi meliputi: penetapan visi “*Stability, security and prosperity for our peoples*” (1993), Bogor Goals yang mencakup “*free and open trade and investment in the Asia-Pacific by 2010 for developed economies and 2020 for developing economies*” (1994), pengadopsian Osaka Action Agenda yang menjadi kerangka untuk mencapai Bogor Goals melalui liberalisasi perdagangan dan investasi, aktivitas yang mendukung aktivitas bisnis, dialog kebijakan dan kerjasama dan teknikal (1995), pengadopsian Manila Action Plan for APEC (MAPA) yang menetapkan cara/ukuran-ukuran pencapaian Bogor goals dan rencana aksi individual dan kolektif untuk mencapai perdagangan bebas (1996); penyusunan proposal bagi Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL) dalam 15 sektor (1997); kesepakatan sembilan sektor pertama dari EVSL dan upaya membangun kesepakatan dengan negara-negara non anggota APEC dalam WTO (1998); komitmen bagi *paperless trading* yang akan dicapai tahun 2005 oleh negara maju dan tahun 2010 bagi negara berkembang (1999) dan pembentukan skema APEC Business Travel Card dan Mutual Recognition Arrangement on Electrical Equipment dan a Framework for the Integration of Women in APEC (1999); Pembentukan sistem Rencana Aksi individual elektronik (e-IAP) (2000); Pengadopsian Shanghai Accord yang memfokuskan pada perluasan visi APEC, klarifikasi Roadmap to Bogor dan penguatan mekanisme implementasi (2001); pengadopsian Trade Facilitation Action Plan, Policies on Trade and the Digital Economy and Transparency Standards (2002); komitmen untuk mensukseskan negosiasi dalam agenda pembangunan Doha WTO (2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007); pengadopsian Busan Roadmap dan APEC Privacy Framework (2005); pengadopsian closer Regional Economic Integration (2007) dan Rencana Aksi baru untuk memfasilitasi perdagangan APEC (2007); pembentukan the Supply-Chain framework dan the Ease of Doing Business Action plan untuk membuat bisnis di kawasan tersebut lebih murah 25 % (2009); formulasi APEC Strategy for Investment dan APEC New Strategy for Structural Reform (2010); deklarasi Honolulu untuk membuat langkah kongkrit bagi “a seamless regional economy”, menangani tujuan-tujuan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan memajukan kerjasama dalam menyusun regulasi-regulasi (2011).

Selain memajukan kerjasama liberalisasi dalam bidang ekonomi, APEC juga menyentuh bidang-bidang lain. Pada tahun 2003 APEC memasukkan agenda meningkatkan keamanan masyarakat yang tinggal di kawasan Asia Pasifik. Pemimpin-pemimpin APEC berkomitmen untuk mengatasi terorisme dan penyebaran penyakit. Ini dipertegas lagi pada KTT APEC di tahun 2004. Pada tahun 2007, APEC menyepakati deklarasi perubahan iklim, keamanan energi dan pembangunan bersih (*clean development*). Pada tahun 2010, APEC menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri dalam isu ketahanan pangan.

²⁰ <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Mission-Statement.aspx> diakses tanggal 6 Maret 2012.

²¹ Ibid

Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)

Forum interregional ini lahir dari inisiatif Perdana Menteri Goh Chok Tong di tahun 1998. Tujuan pembentukannya adalah untuk menjembatani ‘*missing link*’ antara dua kawasan Asia dan Amerika Latin. Tiga tujuan utama adalah: (1) meningkatkan dan memajukan pemahaman bersama, trust, dialog politik dan kerjasama yang bersahabat di antara negara-negara anggota dengan suatu pandangan untuk memperkaya dan membagikan pengalaman dan mendorong kemitraan baru; (2) untuk mewedahi potensi kerjasama multidisipliner di bidang ekonomi, investasi perdagangan, keuangan, budaya, turisme, ilmu dan teknologi, perlindungan lingkungan, olah raga dan *people-to-people exchange*; dan (3) memperluas pijakan bersama menyangkut isu-isu politik ekonomi internasional dengan suatu pandangan untuk bekerjasama dalam forum-forum yang berbeda dalam rangka menjaga kepentingan bersama.

Dalam pertemuan pertama FEALAC Ministerial Meeting (FMM I) tanggal 29-30 2001 di Santiago Chile, menteri-menteri bersepakat untuk mengadopsi *FEALAC Document Framework* dan membentuk tiga kelompok kerja. Kelompok kerja tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dialog dan kerjasama melalui projek-projek FEALAC di bidang politik, budaya, ekonomi, sosial, pendidikan dan ilmu dan teknologi.

Tabel 7. Negara-negara anggota FEALAC

Kawasan	Negara-negara partisipan
Asia Timur	Australia, Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Philipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Mongolia.
Amerika Selatan	Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Kosta Rika, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela

Sumber: http://app.mfa.gov.sg/2006/idx_fp.asp?web_id=9 diakses tanggal 6 Maret 2012

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 5, terdapat tiga puluh empat negara yang berpartisipasi dalam FEALAC. Tujuh belas negara anggota berasal dari Asia, sementara tujuh belas negara lain berasal dari Amerika Latin. Seluruh anggota ASEAN turut berpartisipasi dalam forum ini. Di luar ASEAN, Australia, China, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan dan Mongolia mengambil bagian aktif dalam forum ini.

Sejak dibentuk, beragam aktivitas telah dilaksanakan. Diantaranya adalah pertemuan para jurnalis, pelaku bisnis dan anggota parlemen muda dari kedua kawasan, seminar dan kajian tentang beragam isu seperti terorisme, perdagangan, dan pembentukan kelompok-kelompok kerja yang membahas isu-isu spesifik.

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

BIMSTEC dibentuk pada tanggal 6 Juni 1997 di Bangkok. Awalnya disebut BIST-EC (Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation). Myanmar yang hadir pada peresmian pembentukan BIST-EC bergabung pada tanggal 22 Desember 1997 dan sejak itu namanya diubah menjadi BIMSTEC. Nepal dan Bhutan bergabung tahun 2003. Pada KTT pertama tanggal 31 Juli 2004, pemimpin-pemimpin kelompok ini sepakat untuk menyebut organisasi mereka sebagai BIMSTEC atau the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.²²

Sesuai dengan Deklarasi Bangkok yang mendasari pembentukan BIMSTEC adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pembangunan ekonomi yang cepat, mempercepat kemajuan sosial di wilayah sub-kawasan, mempromosikan kolaborasi yang aktif dan bantuan saling menguntungkan bagi tercapainya kepentingan bersama, saling menyediakan bantuan dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset, untuk bekerjasama dengan lebih efektif dalam mendukung pembangunan nasional di negara-negara anggotanya, dan bekerjasama dalam proyek-proyek yang produktif.

BIMSTEC mengkombinasi cara pandang Thailand yang *‘Look West’* dan cara pandang India dan Asia Selatan yang *‘Look East’*. Dengan demikian BIMSTEC adalah suatu jaringan antara ASEAN dan SAARC. Ada 13 sektor yang ditangani oleh tujuh negara anggota dengan prinsip sukarela, diantaranya perdagangan dan investasi, teknologi, energi, transportasi dan komunikasi, turisme, perikanan, pertanian, kerjasama budaya, lingkungan dan manajemen bencana, kesehatan, *people-to-people contact*, pengentasan kemiskinan, terorisme dan kejahatan transnasional.

Tabel 8. Anggota BIMSTEC

Kawasan/Sub region	Negara anggota
Asia Tenggara (anggota ASEAN)	Thailand, Myanmar
Asia Selatan (anggota SAARC)	Bangladesh, India, Srilanka, Bhutan, Nepal

Sumber: <http://www.bimstec.org>

²² http://www.bimstec.org/about_bimstec.html diakses tanggal 6 Maret 2012.

5.1.3. Hybrid interregionalism

Paparan selanjutnya akan lebih mencermati kerjasama yang dikembangkan ASEAN dengan negara-negara berpengaruh dari berbagai kawasan di dunia. Kerjasama ini seringkali dipandang sangat strategis karena menghasilkan komitmen-komitmen 'bilateral', seperti dalam bentuk bantuan finansial dan teknikal yang lebih implementatif dibanding dengan kerjasama *group-to group* dan *biregional/transregional arrangement*.

Kerjasama ASEAN-Jepang

ASEAN mulai mengembangkan dialog dengan Jepang sejak 1973. Inisiatif yang awalnya bersifat informal tersebut diformalkan pada tahun 1977 dengan diselenggarakannya Forum ASEAN-Jepang.²³ Perkembangan kerjasama meningkat di bidang keamanan, ekonomi-finansial dan sosial budaya. Jepang telah menerima TAC pada bulan 2004 di Jakarta.

Dokumen yang melandasi kerjasama ini adalah *Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millenium* dan *ASEAN-Japan Plan of Action* yang ditandatangani bulan Desember 2003 di Tokyo; *Joint Statement of the Ninth ASEAN-Japan Summit on the Deepening and Broadening of ASEAN-Japan Strategic Parnership* diadopsi di Kuala Lumpur tahun 2005. Deklarasi Tokyo dan Rencana aksinya direview tahun 2010 dalam KTT ASEAN-Jepang di Hanoi dan ditandatangani dalam KTT ASEAN-Jepang ke-14 di Indonesia.

Bagi ASEAN, Jepang merupakan partner dagang yang sangat penting (ketiga terbesar setelah China); sementara bagi Jepang, ASEAN adalah partner dagang terbesar kedua setelah China. Pada tahun 2010, perdagangan meningkat 32 %, dari 78,1 trilyun dolar AS di tahun 2009 menjadi 103,1 trilyun dolar AS. Investasi Jepang di ASEAN juga meningkat 124,3 % di tahun 2010, dari 3,8 trilyun dolar AS di tahun 2009 menjadi 8,4 trilyun dolar AS di tahun 2010.

ASEAN telah bersepakat dengan Jepang untuk meningkatkan kemitraan strategis untuk kemakmuran bersama. Platform kerjasamanya adalah ASEAN-Japan Comprehesive Economic Partnership (AJCEP) yang ditandatangani tahun 2008. Melalui kemitraan ini Jepang berkomitmen untuk menyediakan bantuan bagi the Initiative for ASEAN Integration and other Sub-regional Growth Areas. Jepang juga memiliki komitmen kuat untuk mendukung penerapan Master Plan on ASEAN Connectivity. Kerjasama khusus dilakukan antara ASEAN Coordinating Committee on Connectivity (ACCC) dan Satuan Tugas khusus bagi ASEAN Connectivity yang dibentuk pemerintah Jepang.

Dalam bidang kesehatan masyarakat, dikembangkan proyek *Stockpiling of Tamiflu and Personal Protective Equipment (PPE) against New Infectious Diseases* dengan tujuan untuk mengatasi ancaman Flu Burung. Proyek ini didukung Jepang melalui dana Integrasi Jepang-ASEAN (IAIF) sebesar 30 juta dolar AS. Kerjasama juga dijalankan dalam berbagai bidang lain seperti disaster management, lingkungan hidup, efisiensi energi, dan pertukaran budaya.

²³ <http://www.asean.org/5740.htm> diakses tanggal 7 Maret 2012.

Kerjasama ASEAN-Amerika Serikat

Dialog ASEAN-Amerika Serikat sudah dimulai sejak 1977. Pada tahap awal dimulai dengan pertukaran pandangan tentang isu-isu politik keamanan, namun kemudian berkembang juga dalam kerjasama komoditas, pasar, akses kapital, transfer teknologi, pengembangan sumber-sumber energi, *shipping* dan ketahanan pangan. Pada awal tahun 1990, fokusnya pada program perdagangan, investasi, transfer teknologi dan pengembangan SDM. Kerjasama ini kemudian menyentuh ketiga pilar utama ASEAN.²⁴

Dalam bidang politik keamanan, fokus kerjasama adalah bagaimana peran AS dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dan AS juga mengembangkan kerjasama dalam perang melawan terorisme internasional. AS telah menerima TAC di tahun 2009 dan penerimaan ini menandai pengakuan penting AS terhadap nilai-nilai ASEAN dan sekaligus juga menjadi modal penting untuk peningkatan peran ASEAN di kawasan. ASEAN dan AS telah mengadopsi *Joint Declaration of the 1st ASEAN-US leaders meeting on Enhanced partnership for Enduring Peace and Prosperity* di tahun 2009. Serangkaian pertemuan telah dilakukan untuk merealisasikan deklarasi tersebut.

AS merupakan salah satu partner dagang terbesar bagi ASEAN (terbesar ke-empat). Ekspor ke AS pada tahun 2010 mencapai 100,5 trilyun dolar AS, sementara ekspor mencapai 85,6 trilyun dolar AS. FDI dari AS ke ASEAN dari tahun 2007-2010 mencapai 23,3 trilyun dolar AS. Pada tahun 2010, FDI mencapai 7,5 trilyun dolar AS.

Sebagai upaya peningkatan kerjasama, disepakati *a Joint Vision Statement on the ASEAN-US Enhanced Partnership* pada bulan November 2005. Rencana aksi untuk mengimplementasikan tekad tersebut ditandatangani di bulan Juli 2006 di Kuala Lumpur.

Dalam KTT ASEAN ke-19, pemimpin-pemimpin ASEAN menyambut baik upaya-upaya untuk meningkatkan kemitraan strategis ASEAN-AS. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah kongkrit dan praktikal dalam memperkuat hubungan ini, dibentuklah ASEAN-US Eminent Person Group. Pemimpin-pemimpin ASEAN juga menyepakati pengadopsian rencana Aksi untuk menerapkan *the ASEAN-US Enhanced Partnership for Enduring Peace and Prosperity* (2011-2015). Mereka juga menekankan komitmen untuk memperkuat kerjasama ASEAN-AS dalam bidang politik keamanan, ekonomi dan social budaya termasuk keamanan tradisional dan non tradisional, perdagangan dan investasi, finansial, SME, keamanan energy, transportasi, ICT, ilmu dan teknologi, penanganan bencana, kesehatan public, lingkungan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, ketahanan pangan, pendidikan, sumber daya manusia, budaya dan *people to people exchange*.

Kerjasama ASEAN-Australia

Hubungan ASEAN Australia telah dimulai sejak tahun 1974 ketika Australia berkomitmen untuk memberikan bantuan teknis melalui projek-projek regional khususnya dalam riset dan pembangunan di bidang-bidang yang berkaitan dengan makanan di ASEAN. Dialog ini meningkat di tahun 1980an dengan perhatian pada isu-isu ekonomi

²⁴ <http://www.aseansec.org/23222.htm> diakses tanggal 7 Maret 2012.

khususnya terkait dengan akses ASEAN ke pasar Australia. Kerjasama ini ditingkatkan untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan ekonomi ASEAN dan Australia.

Pada tahun 1990an, ASEAN dan Australia bersepakat untuk memperluas kerjasama dalam bidang pendidikan, lingkungan, telekomunikasi, dan ilmu dan teknologi. Isu-isu politik dan keamanan mulai dibicarakan sejak 1993 dalam Forum ASEAN Australia ke-15.

Melalui kerjasama ini, ASEAN dan Australia mengembangkan Program Kerjasama Ekonomi ASEAN-Australia (AAECP) yang menjadi mekanisme utama untuk menyalurkan bantuan Australia bagi proyek-proyek ASEAN. Program ini ditetapkan pertama kali tahun 1974 dalam Forum ASEAN-Australia di Canberra; pada phase pertama yang berlangsung dari tahun 1974 hingga 1989, pusat perhatian diberikan pada riset dan pengembangan sektor pangan dan agrokultural. Pada AAECP fase kedua (1989-1994), bantuan disalurkan pada proyek-proyek riset mikroelektronik, bioteknologi, energi non konvensional dan ilmu kelautan. AAECP tahap-tahap selanjutnya juga mengalami penyesuaian merespon perkembangan ASEAN dan hubungannya dengan Australia. Pada tahun 2002, ASEAN dan Australia mengembangkan ASEAN-Australia Development Cooperation (AADCP); dalam skema ini telah dikembangkan program Stream dengan dua sub program penting: “Strengthening ASEAN Economic Integration” dan “Enhancing ASEAN Competitiveness” (tentang ini lihat bagian kontribusi interreonalisme dalam perwujudan komunitas ASEAN).

Kerjasama ASEAN-China

Kerjasama ASEAN-China telah dikembangkan sejak tahun 1991 ketika menteri Luar Negeri China Qian Qichen, hadir dalam pembukaan ASEAN Ministerial Meeting ke-24 di Kuala Lumpur sebagai tamu pemerintah Malaysia. China menjadi partner dialog penuh dalam AMM ke-29 tahun 1996 di Jakarta.²⁵ Untuk merealisasikan kerjasama ASEAN China, ditetapkanlah deklarasi bersama tentang “*Strategic Partnership for Peace and Prosperity*” di tahun 2003 dan Rencana Aksi lima tahunan 2005-2010 di tahun 2004. Rencana aksi ini diperbarui kembali dengan *ASEAN China Strategic Partnership Plan of Action for 2011-2015* melalui beragam program aktivitas. ASEAN dan China telah menyepakati kerjasama di sebelas bidang prioritas: pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, Pembangunan Mekong Basin, investasi, energi, transportasi, budaya, kesehatan masyarakat, turisme dan lingkungan. China merupakan partner dialog ASEAN pertama yang menandatangani Treaty of Amity and Cooperation (TAC) pada KTT ASEAN-China di bulan Oktober 2003. China menjadi pendukung penting inisiatif ASEAN dalam proses regional seperti ASEAN Plus Three (APT), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) dan East Asia Summit (EAS).

Pusat ASEAN-China juga telah dibentuk di tahun 2009 yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN-China dalam mempromosikan perdagangan, investasi, pendidikan, budaya dan turisme. Tiga kerangka kerjasama ekonomi (*Trade in Goods Agreement, Trade in Service Agreement dan Investment Agreement*) ditandatangani masing-masing tahun 2004, 2007 dan 2009 sebelum ACFTA direalisasikan pada tanggal 1 Januari 2010. Ekspor ASEAN ke China meningkat 39,1 % di tahun 2010, dari 81,6 trilyun

²⁵ <http://www.asean.org/5874.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

dolar AS di tahun 2009) menjadi 113,5 trilyun dolar AS ditahun 2010. Impor dari China juga meningkat 21,8 % dari 96,6 trilyun dolar AS di tahun 2009 menjadi 117,7 trilyun dolar AS di tahun 2010. China menjadi partner dagang terbesar ASEAN (11,3% total perdagangan ASEAN).

Kerjasama ASEAN-China yang berkontribusi penting adalah dalam bidang transportasi. MoU dalam kerjasama transportasi telah ditandatangani di bulan November 2004 di Vientiane, dimana disepakati kerjasama jangka menengah dan panjang dalam konstruksi infrastruktur transportasi, *transport facilitation*, keamanan dan keselamatan maritim, transportasi udara, pengembangan sumber daya manusia, dan pertukaran informasi. Pada tahun 2010, kerjasama ini ditingkatkan dengan suatu rencana strategis kerjasama ASEAN-China dalam bidang transportasi. Dengan rencana aksi ini, hubungan lintas perbatasan akan dipermudah dengan proyek-proyek pembangunan koridor-koridor transportasi: (1) China-Myanmar-Laut Andaman; (2) China-Laos/Myanmar-Thailand-Malaysia-Singapura; (3) China- Vietnam-Laos-Kamboja; (iv) Vietnam-Kamboja-Thailand-Myanmar dan (v) Vietnam-China-Myanmar-Bengal-India.

China juga membantu direalisasikannya *Initiative for ASEAN Integration* melalui kerjasama sub regional seperti ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) dan the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). (Tentang ini lihat bagian kontribusi interregionalisme terhadap perwujudan komunitas ASEAN)

Kerjasama ASEAN dan India

Kerjasama ASEAN-India telah dikembangkan selama 20 tahun. Diawali dengan kemitraan dialog sektoral di tahun 1992, kerjasama ini menjadi kemitraan dialog penuh sejak Desember 1995. Kerjasama ini meningkat signifikan sejak digelar KTT ASEAN-India di tahun 2002.

Kerjasama ini menyentuh kerjasama fungsional dalam dimensi politik dan keamanan di mana India terlibat dalam banyak forum yang digelar ASEAN seperti ARF, PMC 10+1, EAS, Kerjasama Mekong-Ganga dan Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). India telah mengaksesi TAC di tahun 2003 sebagai bukti keinginan kuat untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN. ASEAN dan India menandatangani *the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity*, yang didalamnya termuat Roadmap kerjasama jangka panjang ASEAN-India di tahun 2004. Rencana aksi lima tahunan (2004-2010) kemudian disepakati pula untuk mengaktualisasikan kerangka kerjasama ini. Dalam KTT ASEAN ke-19, pemimpin-pemimpin ASEAN mengharapkan implementasi lebih lanjut dari kerangka kerjasama ini dalam bentuk-bentuk proyek dan aktivitas kongkrit melalui rencana aksi 2010-2015.

Dalam bidang perdagangan, diakui bahwa volume perdagangan dan investasi antara ASEAN dan India masih relatif rendah jika dibanding dengan partner dialog ASEAN yang lain. Antara tahun 1993-2003, perdagangan bilateral bertumbuh rata-rata 11,2 % pertahun, dari 2,9 juta dollar AS menjadi 12,1 juta AS di tahun 2003. Di tahun 2010, perdagangan mencapai 55,4 juta dollar AS, peningkatan sebesar 41,8% dari jumlah 39,1 juta dolar AS di tahun 2009. Total FDI India ke negara-negara ASEAN berjumlah 3,4% dari total FDI

secara keseluruhan di ASEAN. India merupakan parner dagang terbesar ketujuh dan investor terbesar ke enam di tahun 2009. Pada KTT ASEAN-India tahun 2010, kedua partner ini berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan menjadi 70 juta dolar AS pada tahun 2012.

ASEAN dan India juga mengembangkan kerjasama dalam bidang bisnis, transportasi, turisme dan pertanian dan kehutanan. Dalam bidang sosial budaya, semua projek kerjasama didanai melalui ASEAN-India Fund (AIF).²⁶

Kerjasama ASEAN dan Korea Selatan

Kemitraan ASEAN telah dibangun dengan Korea Selatan ketika keduanya mulai mengembangkan hubungan dialog sektoral di tahun 1989. Korea mendapat status sebagai partner dialog penuh ASEAN pada AMM ke-24 di Kuala Lumpur tahun 1991. Kerjasama ini mencapai puncaknya setelah ditandatanganinya deklarasi bersama tentang *Comprehensive Cooperation Partnership* pada KTT ASEAN-Korea di Vientiane pada tahun 2004. Rencana aksi untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut diadopsi tahun 2005 di Kuala Lumpur. Pada KTT ASEAN-Korea Selatan di Hanoi tahun 2010, keduanya sepakat meningkatkan status hubungan mereka dari *comprehensive cooperation* menjadi *strategic partnership*. Keduanya mengadopsi *Joint Declaration on ASEAN-ROK Strategic partnership for Peace and Prosperity* dan *Action Plan* untuk periode 2011-2015.²⁷ Korea Selatan telah menerima TAC pada tahun 2004 di Vientiane.

Kerjasama pembangunan ASEAN-Korea Selatan mencakup bidang-bidang perdagangan dan investasi, transportasi, turisme, pertanian, ilmu dan teknologi, ICT, lingkungan, kesehatan, pembangunan SDM, budaya, *people-to-people exchange* dan pengurangan gap pembangunan di ASEAN. Proyek-proyek dan program kerjasama ini didukung oleh *the ASEAN-ROK special Cooperation Fund* yang dibentuk tahun 1990 dan *Future Oriented Project Cooperation Fund* yang dibentuk tahun 1997.

Korea merupakan partner dagang kelima terbesar bagi ASEAN, sementara bagi Korea ASEAN adalah partner dagang terbesar kedua. Pada tahun 2010, ekspor meningkat 31,2 % mencapai 45 trilyun dolar AS sementara impor mencapai 53,1 %. Investasi Korea di ASEAN pada tahun 2010 mencapai 3,8 trilyun dolar AS meningkat 155,7 % dari tahun sebelumnya (1,4 trilyun dolar AS). Kerangka kerjasama kemitraan ekonomi untuk pembentukan *ASEAN-ROK Free Trade Area* telah disepakati tahun 2005. *The Agreement on Dispute Settlement Mechanism* dalam kerangka kerjasama kemitraan ekonomi tersebut ditandatangani tahun 2005; *the Agreement on Trade in Goods* (TIG) ditandatangani tahun 2006; *The ASEAN-ROK agreement on Trade in Services* ditandatangani 9 anggota ASEAN dan ROK tahun 2007. *The ASEAN-ROK Free Trade Area* (AKFTA) direalisasikan tanggal 1 Januari 2010, namun pemanfaatan AKFTA ini masih diakui belum maksimal.

²⁶ Interview dengan Duta Besar India untuk Indonesia; lihat juga <http://www.asean.org/5738.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

²⁷ <http://www.aseansec.org/7672.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

Kerjasama ASEAN dan Kanada

Kerjasama ASEAN dan Kanada telah berumur 35 tahun. Dimulai sejak 1977 ketika Menteri Luar Negeri Kanada menyampaikan keinginannya untuk memperluas program bantuan pembangunan untuk ASEAN. Komitmen ini akhirnya diformalkan pada tahun 1981 dengan penandatanganan *ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement* (ACECA) yang berlaku sejak 1 Juni 1982. ACECA awalnya mempromosikan kerjasama industri, komersial dan teknikal; namun pada tahun 1993 bidang kerjasama diperluas mencakup ilmu dan teknologi, lingkungan, institusi building, organisasional dan manajemen, aktivitas sektor swasta dan pengembangan pasar dan kerjasama bisnis.

Di bidang ekonomi, Kanada adalah partner dagang terbesar ke-13. Pada tahun 2010 total perdagangan mencapai 9,8 trilyun dolar AS. FDI dari Kanada ke ASEAN mencapai 1,6 trilyun dolar AS.

Sejumlah proyek kerjasama ASEAN-Kanada telah dilaksanakan dengan dana dari Kanada. Diantaranya adalah *ASEAN Workshop on Preventing Bio-terrorism* (tahun 2007) di Jakarta; *ASEAN Workshop on Forging Cooperation among Anti Terror Unit* (2008) di Jakarta; *the ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiative* (2008) di Surabaya.

Untuk meningkatkan kerjasama ini ASEAN dan pemerintah Kanada telah membuat deklarasi bersama dalam bidang perdagangan dan investasi dengan Kanada dengan cara-cara yang terstruktur pada bulan Oktober 2011. Rencana Aksi sedang dibuat untuk meningkatkan kerjasama ini.

Pada peringatan 35 tahun kerjasama dialog ASEAN-Kanada, Kanada berkomitmen untuk mengembangkan suatu kemitraan dalam riset (*ASEAN-Canada Research Partnership*) di awal 2012. Kegiatan ini didanai Kanada sebesar 1 juta dolar Kanada. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan riset dan kerjasama antar lembaga riset di ASEAN dan Kanada dan sekaligus melihat dampak integrasi regional.

Kerjasama ASEAN dan Selandia Baru

Kerjasama ASEAN dan Selandia Baru dimulai tahun 1975. Selandia Baru bersama-sama dengan Australia dan Jepang merupakan partner dialog pertama ASEAN yang hadir pada KTT ASEAN 1977. Kerjasama ini mencapai puncaknya dengan pengadopsian *ASEAN-New Zealand Joint Declaration on Comprehensive Partnership for 2010-2015* dan Rencana aksi untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut di tahun 2010. Deklarasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memperdalam kemitraan keduanya dalam kerjasama politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya.²⁸

Total perdagangan ASEAN dan Selandia baru mencapai 6,75 trilyun dolar AS meningkat dari 2009 yang hanya mencapai 5,3 trilyun dolar AS. FDI dari Selandia Baru di ASEAN mencapai 239 juta dolar AS pada tahun 2009; terhitung kecil (0,6% dari total FDI di Asia Tenggara).

²⁸ <http://www.asean.org/5826.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

Pada tahun 2009, pemimpin-pemimpin ASEAN telah menandatangani kesepakatan pembentukan *the ASEAN-Australia-Selandia Baru* di tahun 2009. Kesepakatan ini membuka peluang-peluang baru bagi pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. ASEAN menyebut kesepakatan ini sebagai “*a catalyst for an accelerated regional integration*”. Dalam KTT ASEAN di Bali pemimpin-pemimpin ASEAN menekankan pentingnya upaya-upaya untuk penerapan kesepakatan secara komprehensif.

Di samping kerjasama bilateral, Selandia Baru juga mengembangkan kerjasama aktif dengan ASEAN melalui kerangka kerjasama ASEAN-CER. (detil tentang ini lihat di bagian selanjutnya.)

Kerjasama ASEAN dan Rusia

Kemitraan ASEAN-Rusia diawali di tahun 1991 ketika wakil perdana menteri Rusia menghadiri pembukaan AMM di Kuala Lumpur sebagai tamu pemerintah Malaysia. Pada tahun 1996 Rusia menjadi partner dialog penuh ASEAN dalam AMM ke-29 di Jakarta. Puncak hubungan kerjasama adalah dengan diterimanya TAC oleh Rusia pada tanggal 29 Nopember 2004. Akses ini disebut sebagai komitmen partner dialog bagi perdamaian, stabilitas kawasan dan kontribusi penting bagi TAC sebagai “*an important code of conduct governing inter-state relations.*”²⁹

Rusia dan ASEAN menyepakati deklarasi bersama tentang *Progressive and Comprehensive Partnership* di tahun 2005 dan *comprehensive program of action 2005-2015* untuk merealisasikan deklarasi bersama tersebut. *Comprehensive Plan of Action* untuk mempromosikan kerjasama ASEAN dan Rusia dimaksudkan untuk membantu ASEAN dalam upayanya dalam membangun integrasi ekonomi regional dan community building.

Dalam bidang ekonomi, ASEAN dan Rusia melihat potensi untuk peningkatan kerjasama dalam perdagangan dan kerjasama ekonomi lainnya. Total perdagangan ASEAN Rusia mencapai 9,06 juta dolar AS di tahun 2010. Jika dibanding dengan volume perdagangan dengan negara-negara partner dialog lainnya, jumlah ini sangat kecil. FDI dari Rusia dihitung masih rendah – hanya mencapai 60,8 juta dolar AS pada tahun 2010.

Energi dilihat sebagai bidang yang cukup menjanjikan untuk peningkatan kerjasama keduanya. Untuk itu, pada tahun 2010 diselenggarakan konsultasi diantara pejabat senior dalam bidang energi di antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Konsultasi ini melahirkan *ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Programme 2010-2015*. Cakupan kerjasama meliputi program pengembangan kapasitas, pembangunan sumber-sumber energi terbarukan dan alternatif, infrastruktur energi, eksplorasi minyak dan gas, dan pemanfaatan energi nuklir.

Rusia juga berkomitmen untuk mendukung kerjasama sosial budaya. *ASEAN-Russian Federation Dialogue Partnership Financial Fund* (DPFF) dibentuk tahun 2007 dengan kontribusi awal sebesar 500.000 dolar AS. Rusia juga berkomitmen untuk memberi kontribusi sebesar 1,5 juta dollar AS setiap tahun bagi pelaksanaan projek-projek kerjasama.

²⁹ <http://www.asean.org/5922.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

Kerjasama ASEAN dan Pakistan

ASEAN telah mengembangkan dialog sektoral dengan Pakistan sejak AMM ke-26 bulan Juli 1993.³⁰ Peresmian dialog sektoral ini dilakukan di Islamabad pada bulan Nopember 1997. Hubungan dialog sektoral ini dilembagakan melalui pertemuan pertama *ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee* (APJSCC) pada tanggal 5 Februari 1999 di Bali. Sejak itu APJSCC telah bertemu di tahun 2001, 2006 dan 2008 untuk merealisasikan kerjasama dalam perdagangan, industri, investasi, lingkungan, ilmu dan teknologi, drugs dan narkotika, turisme dan pembangunan sumber daya.³¹

Perdagangan total ASEAN dengan Pakistan berjumlah 4,3 trilyun di tahun 2009. Ekspor ASEAN ke Pakistan mencapai 3,83 trilyun dolar AS, sementara impor ASEAN dari Pakistan mencapai 469 juta dolar AS. Investasi Pakistan di negara-negara ASEAN mencapai 8 juta dolar AS di tahun 2009.

Dalam bidang pengembangan SDM, Pakistan menyediakan sepuluh beasiswa penuh dalam bidang teknologi informasi, perbankan, teknik dan obat-obatan bagi mahasiswa negara-negara anggota ASEAN. Pelatihan bahasa Inggris juga diberikan kepada negara-negara CLMV. Sejumlah projek lain telah dilaksanakan dengan *ASEAN-Pakistan Cooperation Fund* termasuk pertemuan bisnis (2000), lokakarya perdagangan (2000), lokakarya industri (2002), pelatihan multimedia dan pengembangan sumber-sumber multimedia (2006), lokakarya tentang produksi makanan halal dan sistem sertifikasi (2009).

5.2. Kontribusi Interregionalisme dalam perwujudan komunitas ASEAN

Kajian tentang institusionalisasi ASEAN sangat kaya dengan berbagai perspektif dan menghasilkan beragam kesimpulan tentang masa depan pelembagaan ASEAN.³² Penelitian ini melihat program/projek yang dikembangkan oleh partner-partner interregional bersama ASEAN, yang dipandang penting untuk mendukung perwujudan komunitas ASEAN 2015. Untuk mengkaji lebih mendalam seberapa jauh interregionalisme mendukung atau menghambat perwujudan komunitas ASEAN, perlu dikaji seberapa jauh partner kerjasama interregional dan partner dialog memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mendukung integrasi kawasan.

5.2.1. Dukungan partner kerjasama interregional bagi projek/program dalam rangka integrasi ASEAN

Partner kerjasama interregional telah memberi kontribusi penting dalam berbagai program/projek untuk mewujudkan komunitas ASEAN. Data Laporan Tahunan ASEAN menunjukkan ragam program/projek yang secara khusus mendapat dukungan finansial dan

³⁰ Sekalipun hubungan ASEAN dan Pakistan sudah berlangsung lebih dari dua dekade, namun ASEAN belum bersepakat untuk memberikan status full dialogue partner kepada Pakistan. Informasi menyebutkan bahwa Singapura belum melihat status tersebut dapat menguntungkan ASEAN secara keseluruhan. <http://www.nationmultimedia.com/2011/05/06/mekong/Asean-refuses-to-make-Pakistan-full-dialogue-partn-30154747.html> diakses tanggal 14 Maret 2012.

³¹ <http://www.asean.org/24052.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

³² Christopher Roberts. (2010). *ASEAN Institutionalisation: The Function of Political Values and State Capacity*. RSIS Working Paper No. 217. Singapura.

teknikal dari partner-partner ASEAN. Berikut adalah paparan laporan tahunan ASEAN 2011 yang mencatat kontribusi partner interregional ASEAN sepanjang tahun 2010-2011. Pada periode ini kerjasama diarahkan untuk membantu memperkuat fondasi integrasi regional yang vital bagi perwujudan komunitas ASEAN tahun 2015.

Tabel 7 mencatat komitmen dan realisasi dari partner kerjasama interregional sepanjang tahun 2010-2011. Proyek/program dan aktivitas yang dikembangkan dalam kerjasama interregional mengacu pada cetak biru integrasi regional yang telah diadopsi oleh pemimpin-pemimpin ASEAN. Dalam perspektif ini, interregionalisme memberi kontribusi pada proses integrasi regional di Asia Tenggara: melalui proyek/program dukungan bagi pengadopsian nilai-nilai yang penting bagi integrasi ASEAN, pengembangan kapasitas dan melalui proyek/program infrastruktur yang dapat memfasilitasi interaksi di antara bangsa-bangsa dalam ASEAN.

Tabel 9. Program/Proyek yang dikembangkan ASEAN dan partner kerjasama interregional (Data ASEAN Annual Report 2010-2011)

No.	Partner kerjasama interregional	Nama Program/proyek	Tujuan	Dana
1.	Australia	ASEAN-Australia Development Cooperation Programme Phase II (AADCPPII)	Penerapan kebijakan-kebijakan prioritas integrasi ekonomi yang sejalan dengan cetak biru komunitas Ekonomi ASEAN	57 juta dollar Australia
		Australian Support for ASEAN Coordination Role in Response to Cyclone Nargis (2009-2010)	Mendukung operasi humaniter ASEAN di Myanmar	2 juta dollar Australia
		implementasi Agreement on Disaster Management and Emergency response (AADMER) Work Programme (2010-2015).	Capacity building – penanganan bencana di Asia Tenggara	1,3 juta dolar AS
2	Kanada	the ASEAN-Canada Plan of Action untuk mengimplementasikan the Declaration on ASEAN-Canada Enhanced Partnership 2010-2015	memperkuat fondasi kemitraan dan kerjasama Kanada dan ASEAN pada prioritas-prioritas isu-isu politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya	n.a.
		finalisasi pembentukan ASEAN-Canada Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).	Pembentukan free trade area	n.a.

3	China	China ASEAN-Fund on Investment	Untuk membiayai proyek-proyek kerjasama investasi China-ASEAN dalam infrastruktur, energi dan sumber-sumber energi, teknologi informasi dan komunikasi dan bidang-bidang lain	10 triliun dolar AS; +kredit 15 triliun dolar AS termasuk utang preferensial sebesar 1,7 triliun dolar AS
		The new ASEAN-China Plan of Action untuk mengimplementasikan Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity (2011-2015)	Memperluas dan memperdalam hubungan dialog ASEAN-China dengan cara yang komprehensif, saling menguntungkan dan strategik	n.a.
6	Uni Eropa	Regional Programming for Asia Strategy Document 2007-2013 – the Multi Annual Indicative Programmes (MIP) 2011-2013: comprehensive border management; higher education; human rights; institutional capacity building.		70 juta Euros
		ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights (ECAP III); Enhancing ASEAN FTA negotiating capacity/Support to the ASEAN-EU FTA negotiating process; ASEAN Air Transport Integration Project (AATIP)		Di dalam dana program kerjasama 70 juta Euros
		The ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support Phase II (APRIS II); ASEAN Center for Biodiversity (ACB); ASEAN-EU Migration and Border Management Programme; ASEAN-EU Statistical Capacity Building Programme		Tambahan dana diluar dana 70 juta Euros
		Implementasi the Plan of Action to Implement the Nuremebrg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership		n.a.

7	India	ASEAN-Indian Green Fund (AIGF)	To support cooperative pilot projects yang bertujuan untuk mempromosikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Kontribusi awal 5 juta dolar AS
		The ASEAN-India Science and Technology Development Fund (AISTDF)	Mendorong aktivitas riset dan pembangunan kolaboratif (R&D)	Dana awal 1 juta dolar AS
8	Jepang	The Mission of Japan to ASEAN	Memperkuat kemitraan Jepang dan ASEAN dalam hampir semua bidang	
		Public outreach program	Untuk mempromosikan kesadaran dan pengetahuan yang lebih besar terhadap pembangunan komunitas ASEAN dan hubungan yang lebih dekat antara masyarakat ASEAN dan Jepang	
		Kerjasama dalam disaster management	Capacity building	
		The Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS)	Mempromosikan mutual understanding di antara kaum muda di ASEAN dan Jepang	
9	Korea	The ASEAN-ROK Transport Cooperation Roadmap dengan 26 joint projects untuk implementasinya	Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, dan kerjasama di bidang logistik, aviasi, jalan raya, rel kereta api, laut dan pelabuhan dan lalulintas sungai.	
		ICT Cooperation with ASEAN	Peningkatan kerjasama dalam infrastruktur ICT, capacity building dll	
		Exchange programmes melalui SCF dan the ASEAN-EOK Future Oriented Cooperation Projects Fund (FOCPF)		
		Lanjutan program IAI 2008-2013		5 juta dolar AS
		Lanjutan program IAI 2013-2017		5 juta dolar AS

10	Selandia Baru	The ASEAN-New Zealand Comprehensive Partnership and Plan of Action (2010-2015)	Untuk memperkuat dan memperdalam kerjasama ASEAN dan Selandia baru	
		The ASEAN-New Zealand Scholarship Programme		
		The Young Business Leaders Exchange Programme		
		Programme on Disaster management and Agricultural Diplomacy		
11.	Rusia	Comprehensive Program of Action (2005-2015) sebagai implementasi ASEAN-Russia Joint Declaration on Progressive and Comprehensive Partnership		
12.	Amerika Serikat	Peningkatan kemitraan ASEAN-AS ke tingkat strategis dan pembentukan Eminent Persons Group		
		The ASEAN Development Vision to Advance National Cooperation and Economic Integration (ADVANCE) – 2007-2015	Untuk mendukung integrasi ASEAN dan pembentukan komunitas ASEAN 2015	150 juta dolar AS
13	Jerman	Penguatan Sekretariat ASEAN	Pengembangan kapasitas sekretariat ASEAN dalam mengimplemntasikan Piagam ASEAN dan kerjasama regional dan integrasi di antara anggota ASEAN	3,5 juta dolar AS
14.	Norwegia	The humanitarian efforts of ASEAN in the aftermath of Cyclone Nargis in Myanmar		1 juta dolar AS
15	Mercosur	Region-to-Region Roadmap and Action Plan		
16.	ASEM	Chair's statement KTT ASEM ke-8; Brussel Declaration on More Effective Global Economic Governance		

17	GCC	The ASEAN-GCC Two Year Action Plan (2010-2012)		
18	Pakistan	Joint-Feasibility Study for an ASEAN-Pakistan Free Trade Agreement	Untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama ekonomi ASEAN-Pakistan	
19	ASEAN Plus Three (APT)	Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) – efektif mulai 24 Maret 2010		120 trilyun dolar AS
		Studies on East Asia Free Trade Area (EAFTA) and Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA)		
		The Luang Prabang Joint Declaration on APT Civil Service Cooperation	Intensifikasi kerjasama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat – khususnya dalam pengembangan SDM	
		APT Bond Market Forum		
		APT Emergency Rice reserve (APTERR) Agreement		

Sumber: Diseleksi dan ditabelkan oleh peneliti berdasar laporan tahunan ASEAN 2008-2009, laporan tahunan ASEAN 2009-2010, dan laporan tahunan ASEAN 2010-2011.

Australia mengembangkan program ASEAN-Australia Development Cooperation Programme Phase sejak tahun 2002 dengan dana awal sebesar 45 juta dolar Australia. Dalam kerangka AADCP ini, dikembangkan *Regional Economic Policy Support Facility* yang bertujuan untuk membantu ASEAN mengembangkan analisis kebijakan ekonomi regional yang tepat, termasuk juga bagaimana menangani isu-isu spesifik terkait dengan indikator-indikator integrasi ASEAN, opsi-opsi mengatasi kerugian dan biaya penyesuaian terkait dengan negara-negara CLMV dalam partisipasi mereka dalam AFTA. Dalam kerangka ini juga dikembangkan *Regional Partnership Scheme* (RPS) dengan tujuan untuk mendukung implementasi aktivitas-aktivitas pembangunan regional berskala kecil dengan dana dalam periode lima tahunan. Tiga macam aktivitas dalam skema ini adalah Eco-label dan sertifikasi dalam kehutanan; analisis kebijakan dan sistem energi; program dukungan bagi rancangan proyek.

Program Stream merupakan komponen terbesar dalam AADCP yang mencakup dua sub program: “*Strengthening ASEAN Economic Integration*” dan “*Enhancing ASEAN Competitiveness*.” Masing-masing komponen berisikan serangkaian aktivitas bersama ASEAN dan Australia yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang lebih luas. Dalam Program Stream ini telah dicanangkan 11 proyek kerjasama sebagai implementasi dari Program ini.

Untuk mendukung realisasi cetak biru pembentukan komunitas ASEAN, Australia mengembangkan ASEAN-Australia Development Cooperation Programme Phase II (AADCP II) dengan tujuan utama untuk penerapan kebijakan-kebijakan prioritas integrasi ekonomik yang sejalan dengan cetak biru komunitas Ekonomi ASEAN. Dana yang disediakan berjumlah 57 juta dollar Australia.

Sebagai contoh lain, ASEAN dan Kanada telah mengadopsi *Terms of Reference (TOR) for the ASEAN-Canada Technical Initiatives for the Roadmap for the ASEAN Community (2009-2015)*. Dengan TOR ini Kanada berkomitmen untuk membantu ASEAN dalam mewujudkan ASEAN community. Diantaranya dengan memperkuat fungsi Sekretariat ASEAN melalui program pengiriman pakar dari Kanada untuk membantu menyusun perencanaan dan pengimplementasian aktivitas-aktivitas mewujudkan komunitas ASEAN.

Uni Eropa adalah mitra interregional yang telah berkomitmen dalam kerjasama pembangunan dengan ASEAN. Bantuan teknis disediakan Uni Eropa untuk meningkatkan daya tahan ASEAN dan untuk mempromosikan pembangunan dan kerjasama regional yang lebih luas. UE telah memberikan bantuan teknis dan finansial bagi ASEAN untuk menjalankan aktivitas-aktivitas, proyek dan program-programnya yang telah disepakati bersama.³³ Uni Eropa mendukung pengembangan dan implementasi ASEAN Project for Regional Integration Support (APRIS). Proyek ini dimaksudkan untuk membuka jalan bagi dialog kebijakan di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dan juga bagi kajian bersama tentang integrasi ekonomi. Pada tahun 2002 Uni Eropa menyediakan dana sebesar 18 juta Euro bagi dijalanannya EC-ASEAN Energy Facility Programme.

Dalam kerjasama pembangunan Uni Eropa dan ASEAN, saat ini ada lima proyek senilai 55,5 juta Euro di bidang lingkungan, energi, hak kekayaan intelektual, dan pendidikan. Dua program lain senilai 13 juta Euro juga sedang dijalankan termasuk, European Commission-ASEAN Regional Cooperation Programme on Standards, Quality and Conformity Assessment dan the ASEAN-EC Project on Regional Integration Support (APRIS). Komisi Eropa juga mendanai pembangunan rencana bisnis bagi the ASEAN-EC Management Centre di Brunei Darussalam.

Uni Eropa menyediakan dana sebesar 4,5 juta Euro dalam APRIS, yang menjadi program kerangka untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam integrasi regional. APRIS bertujuan untuk menarik pelajaran dari pengalaman Komisi Eropa dalam memperkuat integrasi ekonomi regional, memberi kontribusi bagi kemajuaan mekanisme ASEAN dan sistem komunikasi, dan mendukung aktivitas pembangunan kapasitas bagi sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN. Kesepakatan tentang pendanaan ini ditandatangani di awal 2003.

Interregionalisme telah membantu negara-negara ASEAN untuk segera mengadopsi prinsip-prinsip penting dalam perdagangan bebas. Ini misalnya difasilitasi oleh kerjasama ASEAN-CER. AFTA-CER *Closer Economic Partnership* tercatat sebagai kemitraan yang penting yang sejak dicetuskan di tahun 2002 terus bergulir melalui pertemuan di antara menteri-menteri perdagangan negara-negara anggota ASEAN dan CER. Kemitraan ini

³³ Wawancara dengan perwakilan Uni Eropa di Jakarta tanggal 7 Oktober 2012.

dimaksudkan untuk mempromosikan arus perdagangan dan investasi yang lebih besar di antara ASEAN dan CER. Kerjasama tersebut meliputi penghapusan hambatan perdagangan baik teknis maupun non tariff, bea cukai, pembangunan kapasitas, promosi perdagangan dan investasi, penilaian standard dan konformitas, perniagaan elektronik, dan pengembangan unit usaha kecil dan menengah (UKM).³⁴ Dalam proses mempercepat projek dan aktivitas kemitraan ini, ASEAN, Australia dan Selandia baru membentuk AFTA-CER Business Council (ACBC) untuk menghidupkan kembali keterlibatan bisnis dalam inisiatif kemitraan tersebut. ACBC memberikan informasi terkat dengan bidang kerjasama yang menjadi prioritas CEP.

Amerika Serikat juga termasuk partner interregional yang telah memberi kontribusi bagi integrasi regional. Salah satu program penting untuk realisasi rencana aksi implementasi *ASEAN-US Enhanced partnership* adalah *ASEAN Development Vision to Advance National Cooperation and Economic Integration* (ADVANCE) yang diluncurkan pada tahun 2008 dengan dana sebesar 150 juta dolar AS. ADVANCE dirancang untuk mendukung tujuan-tujuan integrasi ASEAN tahun 2015. Beberapa program dan aktivitas meliputi: (1) ASEAN-US Technical Assistance and Training Facility (TATF) Phase II; (2) Lao-US Bilateral Trade Agreement (BTA)/WTO Accession Program; (3) ASEAN Single Window Program; dan (4) Regional Supply Chain/Competitiveness Program.

Interregionalisme telah memberi kontribusi bagi pembangunan prasarana fisik yang mempermudah interaksi antar bangsa-bangsa dalam ASEAN. Ini ditunjukkan oleh kerjasama ASEAN-China dalam bidang transportasi. MoU dalam kerjasama transportasi telah ditandatangani di bulan November 2004 di Vientiane, dimana disepakati kerjasama jangka menengah dan panjang dalam konstruksi infrastruktur transportasi, *transport facilitation*, keamanan dan keselamatan maritim, transportasi udara, pengembangan sumber daya manusia, dan pertukaran informasi. Pada tahun 2010, kerjasama ini ditingkatkan dengan suatu rencana strategis kerjasama ASEAN-China dalam bidang transportasi. Dengan rencana aksi ini, hubungan lintas perbatasan akan dipermudah dengan proyek-proyek pembangunan koridor-koridor transportasi: (1) China-Myanmar-Laut Andaman; (2) China-Laos/Myanmar-Thailand-Malaysia-Singapura; (3) China- Vietnam-Laos-Kamboja; (iv) Vietnam-Kamboja-Thailand-Myanmar dan (v) Vietnam-China-Myanmar-Bengal-India.

India berkomitmen untuk mendukung aktivitas-aktivitas prioritas dalam *Roadmap for an ASEAN community 2009-2015*. India berkomitmen untuk mendukung Initiative for ASEAN Integration (IAI). Ini terwujud melalui the Entrepreneurship Development Centres (EDC), dan Centres for the English Language Training (CELT) di Kamboja, Laos, Myanmar dan India.

Pendanaan juga disediakan oleh India untuk mendukung ASEAN. Pada KTT ASEAN-India tahun 2007, dibentuk *the ASEAN-India Green Fund* dengan kontribusi awal 5 juta dolar AS ditahun 2010 untuk mendukung projek kerjasama bagi promosi teknologi dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kerjasama tersebut juga membentuk *ASIAN-India S&T Development Fund* dengan dana awal sebesar 1 juta dolar AS untuk mendorong pengembangan R&D dan teknologi. Di tahun 2007, India berkontribusi sebesar 1 juta

³⁴ <http://www.aseansec.org/16576.htm> diakses tanggal 6 Maret 2012.

dollar AS dalam ASEAN Development Fund. PM Manmohan Singh berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar 50 juta dolar AS dalam ASEAN India Cooperation Fund dan ADF untuk mendukung beragam inisiatif, termasuk program IAI dan proyek-proyek pendidikan, energi, pertanian, kehutanan, SME dan implementasi ASEAN ICT Master Plan.³⁵

Korea Selatan memainkan peran penting dalam penerapan 15 proyek dalam kerangka *Master Plan on ASEAN Connectivity* termasuk dalam energi dan infrastruktur. ASEAN telah mengundang Korea untuk bekerjasama dalam teknologi pasca panen termasuk *food storage*, pengolahan, preservasi dan distribusi seperti telah disepakati dalam *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (APTERR)*. Juga telah disepakati kerjasama untuk mengembangkan proyek kehutanan dan teknologi sumber-sumber kelautan.

Tabel 7 menunjukkan proyek/program dan aktivitas yang dikelola oleh ASEAN dengan dukungan dari mitra-mitra interregional cukup beragam dan bersifat saling melengkapi satu sama lain. Sifat ini penting untuk mengakselerasi proses pembentukan komunitas ASEAN yang diharapkan dicapai pada tahun 2015. Terdapat aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk memfasilitasi interaksi yang lebih intens dan ekstensif di antara bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara, sehingga interaksi ini akan dapat memunculkan trust di antara bangsa-bangsa di kawasan. Jepang misalnya merupakan mitra dialog yang mendukung pengembangan kesadaran di antara masyarakat ASEAN.

Terdapat pula aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk penguatan kapasitas sekretariat ASEAN yang perannya sangat vital untuk melembagakan proses integrasi regional. Proyek ini misalnya mendapat dukungan dari pemerintah Jerman.

Di samping itu terdapat beragam program yang diarahkan untuk membuat prinsip-prinsip dan norma-norma dalam rejim perdagangan bebas semakin dikenal di antara bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Proyek/program dan aktivitas ini secara komplementer dapat memperkuat kapasitas intra-states yang dapat memfasilitasi integrasi regional; misalnya peningkatan kapasitas sektor pelayanan publik diharapkan dapat mempercepat proses perijinan bagi masuknya produk-produk dari negara-negara ASEAN. Beberapa program diarahkan untuk mendukung reformasi negara-negara untuk mewujudkan good governance.

5.2.2. Dukungan Partner interregional bagi pembangunan CLMV melalui Initiative for ASEAN integration

Satu kepedulian penting yang dimiliki baik oleh anggota-anggota ASEAN maupun partner kerjasama interregional adalah bahwa integrasi sulit terwujud bila gap pencapaian ekonomi antara anggota baru dan lama tidak dijembatani. Karenanya proyek/program perlu dibuat khusus untuk membantu percepatan pembangunan di negara-negara anggota baru yang masuk dalam kategori CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). ASEAN mengakui bahwa *integrated free trade area* akan berfungsi maksimal jika negara-negara ASEAN berada dalam standar pencapaian yang kurang lebih sama:

³⁵ <http://www.asean.org/5738.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

*“Dialogue partners are aware that economic cooperation with ASEAN will depend very much on how fast the new ASEAN countries are able to catch up with the rest of ASEAN. A more integrated ASEAN will be able to move the CEPs and FTAs with the dialogue partners and achieve the timelines set for such arrangements.”*³⁶

Pengakuan ini menjadi salah satu dasar argumentasi bahwa kerjasama dengan partner-partner dialog diarahkan untuk membantu negara-negara CLMV dalam melakukan akselerasi pembangunan mereka. Program-program/projek pembangunan di wilayah Mekong dirancang dengan dana baik dari ASEAN maupun dari partner dialog. Dialog partner juga membantu pembangunan di wilayah lain yang dikenal dengan *the Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and the Philippines- East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*.³⁷

Initiative for ASEAN Integration adalah program yang dirancang khusus untuk membantu negara-negara CLMV sehingga integrasi ASEAN dapat berlangsung dengan relatif lebih cepat. Inisiatif ini disepakati pemimpin-pemimpin ASEAN dalam KTT Informal ASEAN ke-4 bulan Nopember 2000 di Singapura. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, AMM ke-34 bulan Juli 2001 di Hanoi mengadopsi *the Hanoi Declaration on Narrowing the Development Gap for Closer ASEAN Integration*. Rencana kerja dan detil program dan proyeknya ditetapkan dalam AMM ke-35 di bulan Juli 2002 di Brunei Darussalam. Pemimpin-pemimpin ASEAN ini kemudian menyetujui kerangka kerja IAI pada KTT ASEAN di Phnom Penh bulan Nopember 2002.³⁸ IAI Work Plan ini dirancang untuk periode enam tahun dari 2002-2008. Total proyek yang direalisasikan dalam periode ini berjumlah 134 dengan dana sebesar 191 juta dolar AS yang berasal dari negara-negara ASEAN-6, dan 20 juta dolar AS dari partner dialog ASEAN serta agen pembangunan dan sumber-sumber lain.³⁹ Work Plan ini kemudian diperbarui lagi pada tahun 2009 untuk jangka enam tahun berikutnya. Rencana kerja ini merinci detil prioritas isu dan agenda kerja yang diharapkan nantinya dapat membantu negara CLMV untuk berintegrasi dalam komunitas ASEAN.⁴⁰

³⁶ *ASEAN's Strategy towards its dialogue Partners and ASEAN Plus Three Process*”, disampaikan oleh S Pushpanathan, Kepala, Hubungan Eksternal, Sekretariat ASEAN, pada ASEAN COCI Seminar on ASEAN new issues and Challenges, di Hanoi, 3-4 Nopember 2003. <http://www.asean.org/15397.htm> diakses tanggal 14 Maret 2012.

³⁷ Ibid.

³⁸ 2002 Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan 2002-2008, diadopsi oleh Kepala-kepala Negara/Pemerintahan pada KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, 4 Nopember 2002. <http://www.asean.org/14237.htm> diakses tanggal 14 Maret 2012.

³⁹ Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work Plan 2 (2009-2015)

⁴⁰ Ibid.

Tabel 10. Kontribusi ASEAN-6 terhadap Proyek-projek IAI

Negara	Projek/Program	Dana (dolar AS)	Presentasi dari total dana
Singapura	59	24.266.901,50	34
Malaysia	13	5.246.738	22
Brunei Darussalam	66	1.592.517,80	8
Indonesia	16	1.263.221	9
Philipina	9	557.932	5
Thailand	14	481.902	8
TOTAL	177	33.409.212,30	100

Keterangan:

Brunei Darussalam berkomitmen 1,5 juta dolar AS pada pertemuan IAI Task Force ke-26, 12 Februari 2007 di Jakarta.

Singapura menjanjikan 30 juta dolar AS pada KTT ASEAN ke-13 November 2007 di Singapura.

Sumber: *Status Update of the IAI Work Plan I (2002-2008)*, 35th Meeting of the IAI Task Force, 17 October 2009, ASEAN Secretariat, Jakarta.

Projek-projek IAI sebagian besar didanai oleh negara-negara ASEAN-6. Tabel 10 menunjukkan jumlah pendanaan yang disediakan oleh negara-negara tersebut. Singapura merupakan negara anggota ASEAN dengan dana terbesar yang mencapai 24 juta dolar AS lebih atau 34% dari total dana yang terkumpul dari ASEAN-6; disusul Malaysia dengan 5 juta dolar AS (22 %).

Dalam dua tahun pertama pelaksanaan rencana Kerja IAI tahap I, sembilan negara partner dialog memberikan komitmen untuk mendukung bagi realisasi proyek-proyek IAI dengan total pendanaan sebesar 13 juta dolar AS. Lima donor utama adalah Korea Selatan, Jepang, Australia, Uni Eropa dan UNIDO Norwegia dengan total dana 12 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa kerjasama membuahkan hasil penting untuk mendukung inisiatif strategis ASEAN untuk mewujudkan komunitas ASEAN 2015.

Tabel 11. Bantuan partner dialog dalam proyek IAI di CLMV (2002-2008)

No.	Partner dialog	Alokasi Proyek IAI
1.	Korea Selatan	5 proyek IAI dalam infrastruktur, perdagangan, teknologi informasi dan komunikasi (total dana 5 juta dolar AS)
2.	Jepang	Labour and Employment project (2004-2007); 3 IAI HRD projects (bersama dengan Philipina); 1 ICT project (bersama dengan Thailand); 6 IAI Infrastructure projects (bersama Indonesia dan Thailand); 2 IAI HRD projects dalam sistem irigasi dan lingkungan (bersama Malaysia)
3	Australia	1 trade project (2003); National master plan project (2004); 1 labour and employment project
4.	UNIDO (Norwegia)	2 Standards projects (capacity building; establishment of national standards, quality and metrology support infrastructure)
5.	Uni Eropa (melalui Komisi Eropa dan ASEAN Energy facility/EAEF)	4 energy projects
6.	China	Transport project (development study for inland waterway improvement project in CLMV)
7.	India	Railway training programmes; English language training; Entrepreneurial development project
8.	Selandia Baru	2 proyek: NZAID Custom valuation Project – WTO Valuation Agreement and Post Clearance Unit; dan Legal Metrology Needs Assesments in CLMV

Sumber: Diolah dari laporan IAI Unit, ASEAN Secretariat 31 August 2004. "Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan for the CLMV Countries.

Tabel 12. Kontribusi partner Dialog dan lembaga Pembangunan terhadap *IAI Work Plan Projects* Tahap I

No	Dialogue Partners & Development Agencies	Number of Projects	Funding by Donors (USD)	Percentage of Funding (%)	Potential IAI Funding* (USD)
1.	Japan	47	8,085,311	34.8	
	a. Government of Japan	2	1,027,427		
	b. Japan-ASEAN General Exchange Fund (JAGEF)	16	3,559,717		2,000,000
	c. Through ASEAN-Foundation (Japan-ASEAN Solidarity Fund)	4	350,928		
	d. Japan International Cooperation Agency (JICA)	17	1,042,101 ¹		
	e. Japan Overseas Development Cooperation (JODC)	1	30,000		
	f. Japan-ASEAN Exchange Project (JAEP)				1,000,000
	g. Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)	7	2,075,138		30,000,000
	h. ASEAN-Japan Comprehensive Partnership Fund (AJCPF)				54,000,000
2.	Republic of Korea	7	5,125,127	24.2	5,000,000 ²
3.	ASEAN-ROK Future Oriented Co. Fund (FOCF)	-	-		100,000
4.	ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF)	-	-		3,000,000
5.	India	5	3,272,066	15.4	6,000,000
6.	Norway (UNIDO)	2	1,528,502	7.2	
7.	European Union	5	1,113,039 and €23,740	5.2	
8.	Australia	3	999,240	4.7	100,000
9.	Denmark	1	622,395	2.9	
10.	New Zealand	2	412,650	1.9	
11.	United Nations Development Programme (UNDP)	3	445,970	2.1	
12.	ASEAN-Pakistan Cooperation Fund (APCF)	-	-		1,000,000
13.	PR China	1	200,000	0.9	900,000
14.	International Labour Organization (ILO)	1	16,000	0.1	
15.	World Bank	2	29,000	0.1	
16.	ASEAN Bankers Association (ABA)	2	19,159	0.1	
17.	Hanns Seidel Foundation	3	56,047	0.3	
	TOTAL	84	21,924,506 and €23,740	100.0%	98,100,000

- Jumlah dana tersedia untuk semua proyek ASEAN

Sumber: Status Update of the IAI Work Plan I (2002-2008), 35th Meeting of the IAI Task Force, 17 October 2009, ASEAN Secretariat, Jakarta.

Tabel 9 menunjukkan realisasi komitmen pendanaan dari partner dialog ASEAN dan lembaga-lembaga keuangan bagi implementasi Kerangka Kerja IAI periode pertama (2002-2008). Jepang merupakan partner dialog dengan komitmen jumlah proyek dan sekaligus pendanaan terbesar. Lebih dari 8 juta dollar AS disediakan Jepang untuk mendanai 47 proyek IAI. Peran Jepang mencapai 34,8% dari total pendanaan dari partner dialog dan lembaga pembangunan.

Korea Selatan merupakan partner dialog terbesar kedua dengan komitmen dana sebesar 5 juta dolar AS (24,2%); India sebesar 3.272.066 dolar AS (15,4 %), Norwegia sebesar 1.528.502 (7,2%); Uni Eropa sebesar 1,1 juta Euro dan 23.740 Euro (5,2%); Australia sebesar 999.240 dolar AS (4,7%) . Kontribusi negara-negara lain bervariasi.

China juga mendukung proyek-proyek dan program *Initiative for ASEAN Integration* dan kerjasama sub regional seperti ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) dan the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippine East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Proyek dan program-program tersebut merupakan upaya ASEAN untuk mengurangi jurang perbedaan tingkat pencapaian pembangunan ekonomi di antara anggota-anggotanya. Proyek-proyek kerjasama serupa juga direalisasikan dalam bidang pertanian dan teknologi, pendidikan dan budaya, jurnalisme, dan lingkungan.

Partner dialog tersebut juga memiliki dana potensial untuk kelanjutan realisasi rencana kerja IAI tahap selanjutnya. Ini seperti ditunjukkan dalam kolom paling kanan Tabel 10 yang sebagian besar menggambarkan komitmen lebih besar untuk membantu perwujudan komunitas ASEAN melalui proyek-proyek *Narrowing Development Gap* (NDG).

5.2.3. Penerimaan TAC oleh partner interregional

Catatan penting yang disebutkan membanggakan ASEAN adalah bahwa masyarakat internasional saat ini telah menerima nilai-nilai ASEAN seperti dibuktikan dengan aksesinya negara-negara partner dialog ke dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). TAC adalah perjanjian prinsip kerjasama di antara negara-negara anggota pendiri ASEAN. Traktat ini diberlakukan sejak 24 Februari 1976. Amandemen dibuat pada tanggal 15 Desember 1987 dengan kesepakatan yang memperbolehkan negara non anggota ASEAN untuk mengaksesi TAC tersebut. Diamandemen lagi tanggal 25 Juli 1998 dengan tambahan persyaratan aksesinya yang menegaskan bahwa penerimaan TAC oleh non negara anggota ASEAN harus disepakatinya oleh seluruh anggota ASEAN. Pada tanggal 23 Juli 2010 amandemen ketiga ditandatangani lagi; amandemen ini membuat TAC lebih *inclusive* dalam arti tidak hanya menerima negara tetapi juga organisasi regional seperti Uni Eropa, yang anggotanya adalah negara berdaulat.

TAC dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan “*perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship.*”⁴¹ Traktat ini berisikan prinsip-prinsip fundamental yang

⁴¹ Artikel 1, 1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, diadopsi pada KTT ASEAN I di Bali, 24 Februari 1976. <http://www.aseansec.org/1217.htm> diakses tanggal 10 Maret 2012.

harus dihormati negara-negara anggota ASEAN dalam menjalankan hubungan diantara mereka. Berdasarkan amandemen yang dilakukan, TAC mengatur pula prinsip-prinsip yang harus dihormati oleh negara-negara non anggota ASEAN jika ingin membangun hubungan strategis dengan ASEAN dan anggota-anggotanya. Prinsip-prinsip itu adalah:

“(1). Mutual respect for independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations; (2) The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion; (3) Non-interference in the internal affairs of one another; (4) Settlement of differences or disputes by peaceful manner; (5) Renunciation of the threat or use of force; (5) Effective cooperation among themselves.”⁴²

Tabel 13. Pengakuan Treaty of Amity and Cooperation ASEAN

No.	Negara	Tanggal Akses
1	Papua Nugini	25 Juli 1998
2.	China	8 Oktober 2003
3	India	8 Oktober 2003
4	Jepang	2 Juli 2004
5	Pakistan	2 Juli 2004
5	Korea Selatan	27 Nopember 2004
6	Russia	29 Nopember 2004
7	Selandia Baru	25 Juli 2005
8	Mongolia	28 Juli 2005
9	Australia	10 Desember 2005
10	Perancis	20 Juli 2006
11	Timor Leste	13 Januari 2007
12	Bangladesh	1 Agustus 2007
13	Sri Lanka	24 Juli 2008
14	Korea Utara	24 Juli 2008
15	Uni Eropa	23 Juli 2009
16	Amerika Serikat	23 Juli 2009
17	Kanada	23 Juli 2010
18	Brasil	16 Nopember 2011

Sumber: ASEAN Selayang Pandang 2010; <http://www.aseansec.org/26730.htm> diakses 16 Maret 2012.

Dengan menandatangani TAC, negara-negara ASEAN dan mitra strategis wajib untuk menghormati keutuhan negara-negara anggota ASEAN, tidak boleh melakukan intervensi, subversi ataupun koersi; dan tidak mencampuri urusan domestik negara-negara ASEAN. Negara-negara penandatangan TAC juga harus mengedepankan cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan ataupun persengketaan di antara mereka; dan tidak menggunakan cara-cara ancaman ataupun kekerasan. Negara-negara penandatangan juga harus berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama yang efektif di antara mereka.

⁴² Ibid. Artikel 2.

Bagi ASEAN, akses oleh negara-negara non anggota ASEAN merefleksikan komitmen partner ASEAN untuk mempromosikan *peace and stability in the region*. Indonesia melihat bahwa penerimaan TAC oleh non anggota ASEAN menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dipegang dalam TAC menjadi semakin berlaku universal.⁴³ Ini memberikan kepercayaan diri yang besar kepada pemimpin-pemimpin ASEAN untuk mengkonsolidasikan diri dalam membentuk komunitas ASEAN.

Menarik untuk melihat alasan-alasan non anggota ASEAN untuk menerima TAC sebagai prinsip dalam bekerjasama dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya.

China melihat bahwa sikap China untuk menerima TAC disebut sebagai sesuatu yang positif untuk kawasan dan juga dunia. Ini seperti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China Li Zhaoxing: *“it is good for the region. It is good for the rest of the world.”*⁴⁴ Dalam deklarasi bersama antara China dan ASEAN ditegaskan bahwa:

“In today's world that is undergoing complex and profound changes, the enhanced cooperation between ASEAN and China, as two important partners in the Asia-Pacific region, will serve the immediate and long term interests of both sides and is conducive to peace and prosperity in the region.”

Perancis adalah negara anggota UE yang pertamakali menandatangani TAC, sekalipun Perancis bukan partner dialog. Ini menunjukkan nilai penting ASEAN di mata Perancis. Alasan Perancis untuk akses TAC terkait dengan kepentingannya untuk memainkan perannya dalam *“diplomacy of equilibrium”*. Perancis menegaskan bahwa penerimaan TAC ASEAN bertujuan:

“to serve a new ambition for Euro-Asian relations. Founded on the importance of dialogue, confident in the capacities of regional organizations, guaranteed by the respect for the principles of multilateralism, it aims to be egalitarian and balanced”.⁴⁵

Peran Perancis sebagai anggota Uni Eropa juga penting untuk diperhitungkan. Perancis mendukung penuh UE untuk menandatangani TAC karena yakin bahwa *“a European Union Partnership with Southeast Asia is the sole way to attain full effectiveness.”* Perancis berkeyakinan bahwa:

“the European Union possesses the necessary legitimacy to take its rightful place in the various forums for cooperation and dialogue in Asia. In order to better organize and better control the effects of globalization, it is important

⁴³ Seperti disampaikan Marty Natalegawa kepada peserta dialogue on ASEAN dengan Menteri Luar Negeri RI tanggal 7 Nopember 2012.

⁴⁴ http://english.peopledaily.com.cn/200310/08/eng20031008_125556.shtml diakses tanggal 16 Maret 2012.

⁴⁵ Ms. Catherine Colonna, Minister delegate for European Affairs, Perancis, *“France-ASEAN: A relationship serving geopolitical equality”*, http://www.ambafrance-sg.org/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_070109_tribune_asean_eng.pdf diakses tanggal 16 Maret 2012; merupakan opini Catherine Colonna dalam *Straits times*, 12 Januari 2007, *“France happy to sign Amity Treaty”*.

*to promote a new balance between several zones, to guarantee global stability”.*⁴⁶

Kebijakan Perancis di Asia tenggara difokuskan pada dua prioritas: *“Supporting economic and political development, and strengthening integration in a broader continent-based unit that will enable humanitarian or economic crises to be met head on.”*⁴⁷

Aksesi Uni Eropa terhadap TAC ASEAN menarik untuk dicermati. Uni Eropa tentu saja berbeda dengan *‘high contracting parties’* yang selama ini didefinisikan oleh ASEAN sejak 1976. Uni Eropa adalah organisasi regional yang berisikan negara-negara anggota dan memiliki organisasi dengan kompetensi khusus yang berasal dari pendelegasian oleh negara-negara anggotanya. Uni Eropa menyampaikan intensinya untuk mengaksesi TAC dengan *letter of application* tertanggal 7 Desember 2006. Atas dasar inilah kemudian pemimpin-pemimpin ASEAN perlu untuk melakukan amandemen artikel 18 paragraf 3 untuk membuka peluang bagi organisasi regional yang beranggotakan negara-negara berdaulat.⁴⁸ Di sisi ini, kerjasama interregional dengan UE membuat ASEAN bersifat terbuka dan siap untuk mengamandemen traktatnya untuk memperkuat kerjasama tersebut.

Amerika Serikat merupakan negara non Asia Tenggara yang menandatangani TAC ASEAN. Anggota-anggota ASEAN menyambut baik aksesi Amerika Serikat dengan harapan akan menjadi *“strong signal of its commitment to peace and security in the region”*.⁴⁹ Aksesi ini disebut berlangsung relatif cepat sejak President Obama menyampaikan keinginannya untuk membuat *formal interagency process to pursue accession to the ASEAN TAC*.⁵⁰

Alasan Brasil juga menarik untuk dilihat. Brasil merupakan negara Amerika Latin pertama yang menerima TAC. Menteri Luar Negeri Patriota menegaskan pentingnya Brasil untuk memperkuat hubungannya dengan ASEAN dan keinginan pemerintah Brasil untuk memperkuat hubungannya dengan kawasan Asia Tenggara. Patriota berkeyakinan bahwa: *“Brazil will continue to fruitfully cooperate with ASEAN to address both regional and global challenges on bilateral, regional and multilateral basis.”*⁵¹ Dengan penerimaan Brasil, TAC menjadi bersifat universal. Ini dinyatakan menteri luar negeri Indonesia, Marty Natalegawa.⁵²

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ “DECLARATION ON ACCESSION TO THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA BY THE EUROPEAN UNION AND EUROPEAN COMMUNITY” disampaikan pada 17th ASEAN-EU Ministerial Meeting (AEMM) 27-28 May 2009, Phnom Penh, Cambodia <http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/asean-eu-declarations--24661/index.html> diakses tanggal 16 Maret 2012;

⁴⁹ <http://www.asean.org/PR-42AMM-US-Signed-TAC.pdf> diakses tanggal 16 Maret 2012.

⁵⁰ <http://opencrs.com/document/R40583/2009-05-05/> diakses tanggal 16 Maret 2012.

⁵¹ <http://www.aseansec.org/26730.htm> diakses tanggal 16 Maret 2012. Pandangan ini ditegaskan pula oleh Duta Besar Brasil dalam wawancara tanggal 3 Oktober 2011.

⁵² <http://www.antaraneews.com/berita/284956/brazil-akan-jadi-negara-tac-dengan-asean> diakses tanggal 16 Maret 2012. Pernyataan ini disampaikan pula oleh Menteri Luar Negeri RI dalam dialog dengan akademisi tanggal 7 Nopember 2012.

Penerimaan Brazil ke dalam mitra strategik ASEAN akan menjadi pintu yang lebih luas bagi negara-negara di Amerika Selatan untuk mengembangkan kemitraan strategis dengan ASEAN. Dalam wawancara dengan duta besar Argentina, Argentina sedang mempelajari kemungkinan untuk mengakses TAC untuk mendekatkan hubungan Argentina dan ASEAN.⁵³ Ini juga dipandang strategis untuk memperkuat hubungan interregional ASEAN dengan Mercosur dan Rio Group.

Penerimaan TAC oleh negara-negara partner interregional memberikan tingkat kepercayaan diri di kalangan pemimpin-pemimpin ASEAN. Ini menjadi modal penting untuk tetap mempertahankan ASEAN dan memaksimalkan proses integrasi untuk mewujudkan komunitas ASEAN.

Dari deskripsi ini dapat dilihat bahwa kerjasama interregional telah membawa manfaat fungsional dalam beberapa hal. Pertama, kerjasama telah mengakselerasi pengenalan prinsip-prinsip dan implementasi prinsip-prinsip yang penting dalam proses integrasi ekonomik. Untuk mencapai integrasi ekonomi, anggota ASEAN mengenal penerapan beberapa instrument ekonomi seperti penghapusan tarif, *non-tariff measures* (NTMs), kerjasama beacukai, implementasi skema CEPT yang efektif, peningkatan aturan-aturan, standard dan *conformance*, investasi dan peningkatan pelayanan logistic.⁵⁴ Kedua, kerjasama juga telah membantu negara-negara anggota ASEAN untuk merealisasikan projek dan kerjasama yang bersifat prioritas untuk mewujudkan komunitas ASEAN. Ketiga, kerjasama interregional telah membantu untuk mengatasi masalah gap pencapaian ekonomi yang dapat menghambat proses integrasi ASEAN melalui ASEAN Initiative for Integration. Keempat, kerjasama ASEAN telah meningkatkan kapasitas sekretariat ASEAN untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung-jawab ASEAN. Kelima, kerjasama interregional telah meningkatkan pengakuan yang lebih luas akan nilai-nilai ASEAN seperti tertuang dalam TAC.

5.3. Tantangan dalam perwujudan Komunitas ASEAN

Terdapat sejumlah tantangan yang dapat diidentifikasi melalui penelitian ini. Tantangan pertama muncul dalam perwujudan komunitas ekonomik melalui integrasi ekonomik. Tantangan kedua terkait dengan perwujudan komunitas politik dan keamanan ASEAN. Berikut akan dipaparkan kedua tantangan tersebut.

5.3.1. Komitmen interregional dan Perlambatan integrasi ekonomi ASEAN?

Siapa yang lebih diuntungkan dari kerjasama interregional merupakan pertanyaan menarik yang penting untuk dicermati. Indikator yang paling mudah dilihat adalah ada atau tidaknya peningkatan volume interaksi ekonomi seperti sektor perdagangan di antara negara-negara ASEAN jika dibandingkan dengan interaksi ekonomi antara negara-negara ASEAN dengan mitra interregionalnya.

Kerjasama interregional dalam bidang ekonomi di satu sisi memang telah membantu ASEAN untuk segera mengadopsi rejim perekonomian yang terbuka termasuk

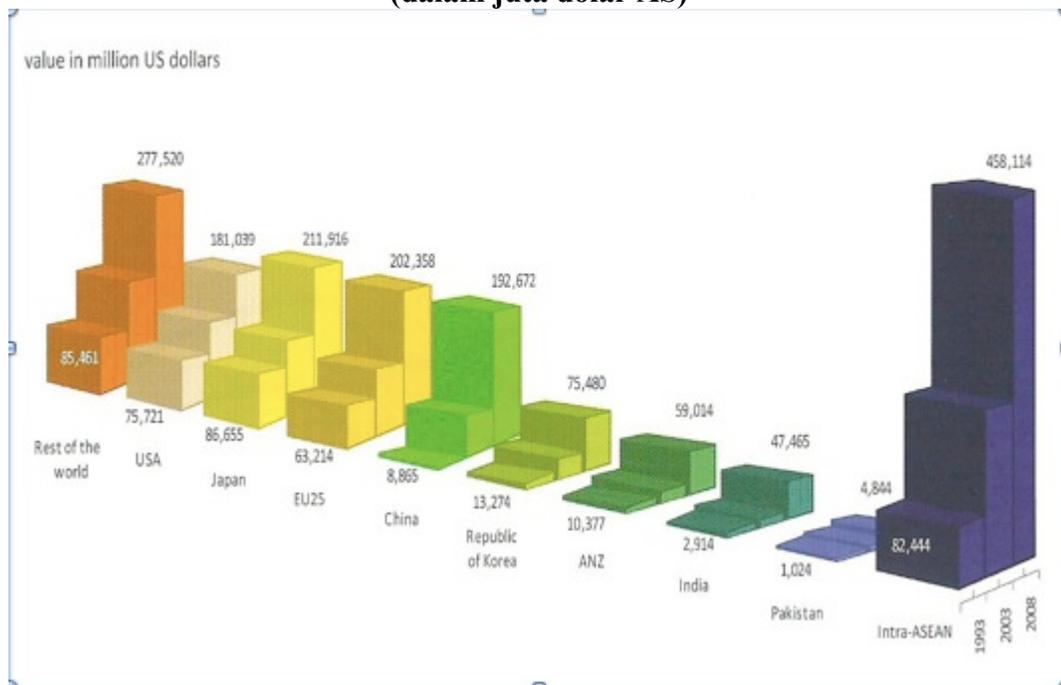
⁵³ Wawancara dengan Duta Besar Argentina tanggal 28 Oktober 2011.

⁵⁴ Dalam sector produk pertanian misalnya dapat dilihat dalam appendix I Roadmap for Integration of Agro-Based Products Sector. <http://www.aseansec.org/16674.pdf> diakses tanggal 22 Maret 2012.

melalui perdagangan bebas. Namun di sisi lain terdapat cukup indikasi bahwa mitra interregional mengambil keuntungan pula dari diadopsinya rejim perekonomian terbuka oleh negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi ini dapat dilihat dengan deskripsi volume perdagangan intra ASEAN jika dibandingkan dengan volume perdagangan dengan negara-negara partner interregional. Sejak cita-cita perwujudan komunitas ekonomi ASEAN dideklarasikan di tahun 2003, perdagangan intra ASEAN mengalami peningkatan. Namun pada saat yang sama volume perdagangan eksternal juga menunjukkan penguatan. Kerjasama interregional telah membawa hasil penting dalam aspek ini, tetapi secara paradoks belum menunjukkan hasil maksimal pada perdagangan intra ASEAN yang seharusnya dapat terwujud melalui integrasi ekonomi ASEAN.

Grafik 1 menunjukkan volume perdagangan intra dan ekstra ASEAN pada tahun 1993, 2003 dan 2008. Ini membuktikan bahwa ASEAN merupakan kawasan yang cukup berkembang dalam dunia perdagangan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam perdagangan intra trade ASEAN dalam rentang waktu tersebut: 82.444 juta dolar AS pada tahun 1993, menjadi 458.114 juga dolar AS pada tahun 2008. Dalam rentang waktu tersebut perdagangan dengan partner interregional juga mengalami peningkatan yang penting. Dari grafik tersebut memang terlihat bahwa perdagangan intra ASEAN tetap unggul jika dibandingkan dengan perdagangan dengan negara-negara partner secara individual maupun juga perdagangan dengan UE yang mewakili suatu pengelompokan regional dari Eropa. Namun secara total perdagangan intra-ASEAN masih terhitung sangat kecil.

**Grafik 1. Perdagangan intra dan ekstra ASEAN 1993, 2003 dan 2008
(dalam juta dolar AS)**



Sumber: Atmono Suryo, ASEAN Trade, <http://aseanonthemove.com/asean-trade-2/> diakses tanggal 22 Maret 2012

Seperti ditunjukkan dalam Grafik 1, pada tahun 2000 perdagangan ASEAN mencapai 759 milyar dolar AS; jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat hingga 1.710 milyar dolar AS di tahun 2008, sebelum krisis finansial global terjadi.⁵⁵ Namun demikian ternyata perdagangan intra ASEAN hanya mencapai 26,8 persen sementara perdagangan ekstra ASEAN mencapai 73.2 % di tahun 2008.⁵⁶

Tabel 12 menunjukkan gambaran yang kurang lebih sama. Pada periode tahun 2009-2010 (Juli 2010), perdagangan ekstra ASEAN meningkat mencapai 75,7%, sementara perdagangan intra ASEAN menurun menjadi 24,3% dari seluruh total perdagangan ASEAN.

**Tabel 14. Perdagangan intra dan ekstra ASEAN 2009-2010
(dalam juta dolar AS)**

Negara	Perdagangan intra ASEAN		Perdagangan ekstra ASEAN		Total perdagangan
	Nilai	Persentase dari perdagangan total	Nilai	Persentase dari perdagangan total	
Singapura	140.694,1	27,3	374.923,1	72,7	515.617,1
Thailand	59.250,1	20,7	227.016,7	79,3	286.266,8
Malaysia	72.065,3	25,7	208.156,0	74,3	280.221,4
Indonesia	52.366,3	24,5	160.972,9	75,5	213.339,2
Vietnam	22.121,5	17,6	103.800,4	82,4	125.921,9
Philipina	17.399,5	20,7	66.469,1	79,3	83.868,6
Myanmar	5.262,4	51,6	4.928,9	48,4	10.191,3
Brunei Darussalam	2.472,1	25,8	7.096,1	74,2	9.568,2
Kamboja	2.097,9	23,6	6.788,8	74,2	8.886,7
Laos	2.478,2	83,7	484,0	16,3	2.962,1
ASEAN	376.207,3	24,5	1.160.635,9	75,5	1.536.843,3

Sumber: Data diambil dari ASEAN secretariat dengan perankingan oleh peneliti

Banyak faktor yang dapat menjelaskan mengapa perdagangan intra ASEAN belum berkembang pesat termasuk sejak ASEAN mendeklarasikan cita-cita pembentukan komunitas ekonomik ASEAN. Dalam bidang perdagangan, muncul kesulitan dalam menyusun dan memberlakukan rejim perdagangan intra ASEAN, karena pada saat yang

⁵⁵ <http://aseanonthemove.com/asean-trade-2/> diakses tanggal 22 Maret 2012

⁵⁶ Ibid.

sama negara-negara anggota ASEAN membangun komitmen dengan partner-partner interregional ASEAN. Integrasi ekonomi diharapkan dapat menghasilkan keuntungan maksimal bagi negara-negara anggotanya dan dengan demikian kesejahteraan akan dapat dicapai. Untuk itu, perdagangan antar negara anggota ASEAN perlu difasilitasi dengan berbagai kemudahan; kesepakatan-kesepakatan ekonomi perdagangan dilihat penting untuk mewujudkan kawasan perdagangan yang bebas.

Perdagangan dengan mitra interregional memang memberikan keuntungan besar bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Perdagangan ini dapat menstimulasi pengembangan sektor produksi di negara-negara tersebut. Namun melihat strategiknya fungsi integrasi ekonomi melalui perdagangan, agenda peningkatan intra trade tetap sangat penting. Selain dapat menstimulasi pertumbuhan sektor produksi, perdagangan intra ASEAN dapat menstimulasi tumbuhnya kepercayaan ekonomik dan hubungan mutualisme ekonomik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jika ASEAN ingin mencapai integrasi, negara-negara ASEAN harus mampu meningkatkan perdagangan internalnya karena ini akan memainkan peran sentral sebagai *driving force* bagi kerangka integrasi regional, termasuk dapat menghadapi negara-negara besar kawasan seperti China dan Jepang.⁵⁷

5.3.2. Interregionalisme dan Peningkatan Pengaruh Eksternal di kawasan Asia Tenggara

Tantangan lain muncul dalam perwujudan komunitas politik dan keamanan ASEAN. Kawasan Asia Tenggara menjadi suatu wilayah yang terbuka bagi kehadiran negara *superpower* dan *major power* baik di tingkat global maupun Asia. Amerika Serikat dan Uni Eropa merupakan dua *global player* penting yang kini semakin dapat memainkan pengaruhnya di kawasan ini; sementara di kawasan Asia China dan Jepang berusaha untuk menjadikan kawasan ini sebagai pijakan penting untuk memainkan pengaruh di tingkat global. Demikian pula India memiliki kepentingan strategis serupa untuk berkiprah di level internasional. Melalui pembentukan *strategic partnership* dengan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh di dunia dan kawasan, ASEAN menjadi sebuah institusi yang sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan kekuatan-kekuatan global dan kawasan tersebut. Selama ini ASEAN menghadapi kesulitan untuk bersikap resistensi terhadap kehadiran dan pengaruhnya di kawasan ini.

Kesulitan ASEAN untuk menunjukkan resistensinya dapat dilihat pada pengaruh China di kawasan Asia Tenggara.⁵⁸ Pengaruh tersebut sudah dapat diperhatikan dalam beberapa kasus seperti pembicaraan menyangkut Laut China Selatan. China telah menjadi aktor yang berpengaruh dalam pembicaraan konflik Laut China Selatan. Kerjasama

⁵⁷ Press Conference on ASEAN Connectivity Symposium (9/11), Enhancing ASEAN connectivity to support ASEAN Community, 8-9 Nopember 2011, <http://www.aseancommunityindonesia.org/siaran-pers/583-press-conference-on-asean-connectivity-symposium-911.html> diakses tanggal 23 Maret 2012.

⁵⁸ Lihat analisa Donald K Wetherbey (2009). *International relations in Southeast Asia. The Struggle for autonomy*, Lanham: Rowman & Littlefield; Lihat juga: Alan Collins (2000), *The Security Dilemmas of Southeast Asia*. Basingstoke: MacMillan; tulisan lain misalnya analisa Denny Roy (2002). "China and Southeast Asia: ASEAN Makes the Best of the Inevitable". *Asia-Pacific Center for Security Studies*, Vol. I No. 4.

interregional ASEAN dan China di satu sisi memang memberikan kepercayaan diri ASEAN untuk dapat menekan China untuk tidak memakai cara-cara kekerasan atau militer dalam upaya mendukung klaimnya atas wilayah laut China Selatan. Di sisi lain, ASEAN harus mengakui posisi China dalam upaya penyelesaian konflik laut China Selatan yang berdimensi kompleks tersebut. Telah dikembangkan pembicaraan multilateral yang diprakarsai ASEAN, sementara China juga terus mengembangkan pembicaraan bilateral dengan negara-negara yang berkonflik langsung menyangkut klaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan.

Pengaruh lain terlihat dalam hubungan ASEAN dengan Uni Eropa dan ASEM. Melalui wadah ASEM, Uni Eropa telah menunjukkan posisinya yang tegas menyangkut isu politik domestik negara anggota ASEAN khususnya Myanmar. Di tahun 1999, pertemuan UE dan ASEAN ditunda karena UE keberatan dengan masuknya Myanmar dalam ASEAN dan partisipasi Myanmar dalam pertemuan tersebut.⁵⁹ Uni Eropa telah menyampaikan keberatan ketika Myanmar seharusnya mendapatkan gilirannya untuk menjadi ketua ASEAN. Negosiasi UE dan ASEAN menyangkut pembentukan kerjasama ekonomi termasuk *Free Trade* mengecualikan keterlibatan Myanmar dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Hubungan UE dan ASEAN di satu sisi memang membuat ASEAN harus menjadi terbuka termasuk menyangkut prinsip-prinsip *non interference* yang sejak 1976 telah diadopsi secara kaku. Desakan UE untuk mendorong perubahan di Myanmar mau tidak mau membuat isu Myanmar dapat dibawa dalam agenda ASEAN. Ini mempercepat realisasi gagasan *flexible engagement* dan *constructive engagement* yang muncul di akhir tahun 1990an, namun segera ditolak oleh Myanmar.⁶⁰ Pengaruh UE membuat ASEAN tidak memiliki banyak pilihan kecuali mendapatkan konsesi dari Myanmar terkait rencananya untuk reformasi domestik dan kerelaannya untuk menerima posisi UE supaya hubungan UE dan ASEAN dapat berlangsung.

Di sisi lain, pengaruh UE menunjukkan bahwa hubungan ASEAN dan UE bersifat asimetrik dimana posisi ASEAN masih cukup lemah dibanding Uni Eropa. ASEAN masih merupakan organisasi regional yang belum solid, *incomplete regional organization*.⁶¹ ASEAN belum menjadi suatu representasi dari integrasi regional yang sudah siap menjadi subjek dalam berhubungan dengan mitra-mitra interregionalnya. Tuntutan yang muncul adalah bahwa ASEAN harus bersikap tegas dalam mendorong anggota-anggotanya melakukan sejumlah penyesuaian struktural di tingkat domestic untuk menjamin nilai-nilai

⁵⁹ “EU-ASEAN AND THE CASE OF BURMA ASEAN-EU meeting postponed over Myanmar issue “ http://www.tni.org/archives/asean-watch_asean37 diakses tanggal 23 Maret 2012; EU, ASEAN clash on Myanmar sanctions, but both call for reforms, http://news.monstersandcritics.com/asiapacific/news/article_1375525.php/EU ASEAN clash on Myanmar sanctions but both call for reforms; lihat analisis David Camroux (2008). *The European Union and ASEAN: Two to tango*. Research paper, Notre Europe, dipublikasikan dalam http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etude65EU-ASEAN-en.pdf diakses tanggal 23 Maret 2012.

⁶⁰ Amitav Acharya (2001). *Constructing a security community in Southeast Asia. ASEAN and the problem of regional order*. London dan New York: Routledge.

⁶¹ Seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia dalam wawancara tanggal 7 Oktober 2011.

yang standar. Kalau ini belum berhasil, sulit mengharapkan suatu dialog yang setara di antara ASEAN dan Uni Eropa.

Pertanyaan lain yang penting untuk dicermati terkait dengan tantangan kedua ini adalah apakah integrasi regional di kawasan ASEAN menjadi kepentingan negara-negara mitra interregional? Dalam paparan di bagian terdahulu telah ditunjukkan bagaimana mitra-mitra interregional telah berkontribusi bagi proyek dan program-program yang nantinya diharapkan dapat membantu terwujudnya pembentukan komunitas ASEAN. Pertanyaannya dapat diformulasikan menjadi: apakah kontribusi itu dilihat dengan perspektif yang sama dengan ASEAN: untuk mencapai tujuan akhir bagi terwujudnya komunitas ASEAN? Atau mereka melihat komunitas ASEAN yang dicita-citakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi hubungan interregional yang lebih memberi peluang bagi keuntungan lebih besar lagi untuk mereka.

Banyak analisis telah dibuat menyangkut perspektif tujuan final hubungan interregional ini.⁶² Uni Eropa disebut membangun kerjasama dengan ASEAN dalam rangka untuk membangun hubungan inter-kawasan dengan ASEAN yang dirasa masih sangat lemah jika dibandingkan dengan hubungan UE dengan Amerika Utara, dan barangkali juga dengan Afrika. Perspektif lain melihat hubungan UE lebih sebagai instrumen untuk membangun ‘*engagement*’ dengan China yang selama ini dirasa sangat lemah.

Amerika Serikat membangun hubungan dengan ASEAN tentu saja karena kepentingan strategis di sisi Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mencanangkan strategi *forward deployed diplomacy* dan menempatkan Asia sebagai kawasan prioritas dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat di bawah Barack Obama. Pidato Hillary Clinton menegaskan kepentingan strategis ini: “*The Future of politics will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the United States will be right at the center of the action.*”⁶³ Pertumbuhan ekonomi Asia dan arti strategis ASEAN menjadi dasar mengapa Amerika Serikat harus berada di kawasan ini: “*Harnessing Asia’s growth and dynamism is central to American economic and strategic interests and a key priority for President Obama*”.⁶⁴ Seperti gagasan UE, AS perlu meyakinkan bahwa kerjasama Transpasifik tetap menjamin keberlangsungan kepentingan domestik AS. Kajian Heiner Hanggi (2000: 12) menunjukkan dampak negatif *transregional arrangement* yang dibangun melalui APEC ternyata dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk menghalangi pembentukan blok regional di Asia Timur; di mata Amerika Serikat dan negara-negara yang sealiran, APEC menjadi “*safeguard against the creation of a regional bloc in East Asia*”.

Kehadiran AS di kawasan Asia Tenggara juga menjadi kepentingan ASEAN terutama untuk menjadikan ASEAN sebagai kekuatan sentral baru di kawasan maupun dalam konteks global, atau ambisi yang dikenal dengan *ASEAN centrality*.⁶⁵ ASEAN juga

⁶² Lihat David Camroux (2008). Op.Cit.

⁶³ Hillari Clinton, (2011) *America’s Pacific Century*.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century diakses tanggal 23 Maret 2012.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Benjamin Ho, RSIS. (2012). “ASEAN centrality: a year of big power transitions” dalam *East Asia Forum*, 6 Maret 2012, <http://www.eastasiaforum.org/2012/03/06/asean-centrality-a-year-of-big-power-transitions/> diakses 23 Maret 2012.

memiliki kepentingan pragmatis untuk menghadapi meningkatnya pengaruh China di kawasan ini; peningkatan ini dikhawatirkan akan memunculkan hegemoni China di kawasan. Tindakan patroli China di laut China Selatan yang seringkali di luar 'kesepakatan' informal dengan pemimpin-pemimpin ASEAN telah meresahkan ASEAN dan ini meyakinkan bahwa Amerika Serikat memang dibutuhkan di Asia Tenggara.⁶⁶ Untuk itu ASEAN membutuhkan kehadiran kekuatan eksternal untuk menjadi penyeimbang pengaruh China di Asia Tenggara. Peran India dan Russia juga patut untuk dibutuhkan di kawasan. *East Asian Community* merupakan wadah besar yang membuat secara politis ASEAN merasakan 'kenyamanan' dalam kondisi keseimbangan kekuatan global di tingkat regional.

Bagaimanapun konstelasi power global di tingkat kawasan sekalipun membuat Asia Tenggara menjadi terproteksi dapat berdampak pada sulitnya membangun arsitektur ekonomi dan politik kawasan Asia Tenggara. Karakteristik hasil proses integrasi ASEAN dalam wadah komunitas ASEAN akan tetap merefleksikan suatu institusi yang terbuka dan ('dipaksa' untuk) adaptif terhadap pengaruh eksternal. Interregionalisme yang dikembangkan ASEAN dengan mitra-mitra interregionalnya memastikan bahwa integrasi ASEAN tidak akan membuat konstruksi regionalism ASEAN sebagai institusi yang tertutup ketat dan otonom. Peran aktor eksternal dan pengaruhnya akan menjadi salah satu pilar penting dari komunitas ekonomi dan politik keamanan ASEAN.

⁶⁶ Mark J. Valencia. (2012). "Diplomatic Drama: The South China Sea Imbroglio" http://www.globalasia.org/V6N3_Fall_2011/Mark_J_Valencia.html diakses tanggal 23 Maret 2012.

Bab VI. Kesimpulan

Penelitian ini telah memaparkan hubungan interregionalisme dan perwujudan komunitas ASEAN melalui proses integrasi regional ASEAN. Data-data menunjukkan kontribusi penting dari mitra-mitra interregional dalam mendukung proyek dan program-program kongkrit yang ada dalam cetak biru untuk mewujudkan komunitas ekonomi dan politik keamanan ASEAN. Di antara kontribusi tersebut adalah percepatan pengadopsian nilai-nilai dan prinsip-prinsip perekonomian terbuka dan perdagangan bebas yang menjadi fondasi penting bagi komunitas ekonomi regional yang terintegrasi. Mitra interregional juga membantu peningkatan kapasitas sekretariat ASEAN untuk memfasilitasi penguatan proses integrasi regional. Pengakuan mitra-mitra dialog ASEAN atas *Treaty of Amity and Cooperation* memberikan kepercayaan diri ASEAN untuk terus mengkonsolidasikan diri mewujudkan komunitas politik dan keamanan di kawasan.

Penelitian ini juga telah mengidentifikasi sejumlah tantangan riil yang harus dihadapi ASEAN sebagai dampak dari hubungan interregional yang dibangun dengan mitra-mitranya. Integrasi ekonomi ASEAN menjadi sangat longgar, karena pada saat yang sama ASEAN juga harus mengakomodasi kepentingan mitra-mitranya untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar bagi produk-produk domestik mereka. ASEAN juga harus berhadapan dengan pengaruh-pengaruh eksternal dalam bidang politik keamanan.

Interregionalisme yang dikembangkan ASEAN dengan partner-partner interregionalnya telah membuat ASEAN menjadi organisasi regional yang bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan politik internasional. Ini dapat dilihat dengan kesiapan ASEAN untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota non-ASEAN dan memformalkan hubungan tersebut menjadi bersifat strategis. Untuk itu ASEAN telah mendefinisikan konsep '*high contracting parties*' dalam dokumen fundamentalnya yang menjadi prinsip hubungan kerjasama di antara anggota ASEAN sejak 1976, *Treaty of Amity and Cooperation*. ASEAN telah melakukan amandemen TAC terkait dengan *contracting parties* selama tiga kali, yang memungkinkan baik negara berdaulat maupun organisasi regional yang beranggotakan negara-negara berdaulat untuk menerima nilai-nilai yang diadopsi oleh ASEAN.

Integrasi ekonomi ASEAN yang menjadi salah satu pilar ASEAN bersifat terbuka. Dalam proses mewujudkan komunitas ASEAN, pemimpin-pemimpin ASEAN telah mengembangkan komitmen untuk membuat wadah ekonomi ini (pasar dan instrumennya) menjadi lebih luas daripada sekedar komunitas 500 juta konsumen potensial dan aktual di kawasan Asia Tenggara. FTA telah menjangkau seluas Asia Tenggara ditambah China, Australia dan Selandia Baru. Dalam perspektif interregionalisme, saling ketergantungan asimetrik tetap menjadi karakteristik hubungan ASEAN dan mitra interregional jika ASEAN gagal untuk menstimulasi interaksi ekonomi intra ASEAN.

Pengalaman ASEAN dalam mewujudkan komunitas ASEAN dengan konstruksi regionalism yang definitif, solid dan otonom menunjukkan kesulitan suatu proses integrasi dalam konteks globalisasi. Interregionalisme dalam bidang ekonomik tampaknya bukan lagi pilihan, namun keharusan untuk mengatasi kelemahan dari lambannya proses produksi; interregionalisme dalam bidang politik dan keamanan juga merupakan keharusan untuk menutupi kekurangan kemampuan ASEAN untuk berhadapan dengan kekuatan

hegemon regional dan global. Kajian ini menunjukkan bahwa konstruksi integrasi ASEAN akan sangat diwarnai oleh pengaruh eksternal yang sengaja diciptakan oleh mitra-mitra interregionalisme ASEAN. Ini akan membuat sulit bagi ASEAN menjadi suatu organisasi regional yang benar-benar otonom untuk mendefinisikan kepentingan internal dan independensinya dalam menyikapi perkembangan eksternal.

Daftar Pustaka

- Amitav Acharya. "Ideas, Identity and Institution-building: From the 'ASEAN way' to the 'Asia-Pacific way'?" *The Pacific Review*. Vol. 10 no. 3 pp 319-346.
- BUI Truong Giang (2008). *Intra-regional Trade of ASEAN Plus Three: Trends and Implications for East Asian Economic Integration*. CNAEC Research Series 08-04. Korea Institute for International Economic Policy. 30 Desember 2008.
- Charalambos Tsardanidis. *EU and its Neighbours: A Wider Europe through inter-regionalism, through 'dependencia' regionalism or through Sub-regionalism?*. Paper prepared for the Conference "Mapping Integration and Regionalism in a Global World: The EU and regional governance outside the EU." University of Bourdeaux, September 2008.
- Charalambos Tsardanidis. "The BSEC: From New Regionalism to Inter-regionalism?" *Agora Without Frontiers*. Vol. 10 No. 4, 2005, pp. 362-391.
- CHEN Zhimin. "NATO, APEC and ASEM: Triadic Interregionalism and Global Order". *Asia Europe Journal*, 2005.
- Christopher M. Dent. "The Asia Europe Meeting and Inter-regionalism. Toward a Theory of Multilateral Utility". *Asian Survey*. Vol. 44. No. 2 (March – April 2004), pp. 213-236.
- Christopher Roberts. (2010). *ASEAN Institutionalisation: The Function of Political Values and State Capacity*. RSIS Working Paper No. 217. Singapura.
- David Mitrany (1948). "The Functional Approach to World Organization". *International Affairs*, Vol. 24, No. 3 Juli 1948
- David Mitrany (1966). *A Working Peace System*. Chicago: Quadrangle Books
- Denny Roy (2002). "China and Southeast Asia: ASEAN Makes the Best of the Inevitable". *Asia-Pacific Center for Security Studies, Vol I no. 4*.
- Donald K Wetherbey (2009). *International relations in Southeast Asia. The Struggle for autonomy*, Lanham: Rowman & Littlefield
- Ernst Haas, *The Uniting of Europe*, Standford, CA: Standford University; Enst Haas, (1975). *The Obsolete of Regional Integration Theory*, Monograph, Berkeley: California University.

- Heiner Hinggi. *Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspectives*. Paper prepared for the workshop: “Dollars, Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration in the Americas”. Los Angeles, May 2000.
- Helen E.S. Nesaduri, “The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)”, *New Political Economy*, Vol. 13, No.2, June 2008, hal. 225.
- Jewellord T. Nem Singh. *Process of Institutionalisation and Democratization in ASEAN: Features, Challenges and Prospect of Regionalism in Southeast Asia*. UNISCI Discussion Papers No. 16 , January 2008.
- Julia Gilson. *Inter-Regionalism*. Paper presented at the ECPR Standing Group on International Relations. University of Turin September 2007.
- Julie Gilson. *Defining Inter-Regionalism: The Asia-Europe Meeting (ASEM)*. SEAS Electronic Working Papers. Vol. 1 No. 1. November 2002.
- Jurgen Ruland. *ASEAN and the European Union: A Bumpy Interregional Relationship*. Discussion Paper C 95, Center For European Integration Studies. 2001.
- Karl Deutsch, (1953). *Nationalism and Social Communication*. Cambridge, Mass: MIT.
- Karl Deutsch (1957) *Political Community and the North Atlantic Area*. Princeton, NJ: Princeton UP.
- Keohane, R. (1987).”Power and Interdependence”. *International Organization*. Vol. 41, No. 4 hal. 725-753.
- Mathew Doidge. *From Developmental Regionalism to Developmental Interregionalism? The European Union Approach*. NCRE Working Paper No. 07/01, July 2007.
- Michael Reiterer. *Regionalism – Interregionalism: An Asian Perspective seen from the EU*. Universitat Luzern. 2011.
- Michael Reiterer. *Interregionalism: A New Diplomatic Tool the European Experience with East – Asia*. 3rd Conference of the European Union Studies Association Asia-Pacific (EUSA-AP), December 2005.
- Richard Weixing Hu, *Building Asia Pacific Regional Architecture: The Challenge of Hybrid Regionalism*. The Brooking Institution Center for Northeast Asian Policy Studies. July 2009.
- Sebastian Santander. *EU-LA relations: From Interregionalism to Bilateralism*. Working Paper no. 29. Programa de America Latina. Centro Argentino de Estudios Internacionales. 2010.

Valeria Marina Valle. *Interregionalism: A Case Study of the European Union and Mercosur*. GARNET Working Paper no. 51/08, July 2008.

Vinod K. Aggarwal and Edward A. Fogarty. (2004) "Explaining Trends in EU Interregionalism." In Vinod Aggarwal and Edward Fogarty (eds). *European Union Trade Strategies: Between Globalism and Regionalism*. London: Palgrave, 2004.

Yeo Lay Hwee and Lluç Lopez I Vidal. *Regionalism and Interregionalism in the ASEM Context: Current Dynamics and Theoretical Approaches*. Documnetos CIDOB ASIA 23. Barcelona 2008.

Yulius P Hermawan. (2007), *Supranasionalisme, Intergovernmentalisme dan Transformasi Eropa dalam Yulius P Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional, Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Situs internet

<http://www.asean.org/15397.htm> diakses tanggal 14 Maret 2012.

<http://www.aseansec.org/5612.html> diakses tanggal 25 Januari 2012.

<http://www.aseansec.org/16576.htm> diakses tanggal 6 Maret 2012.

http://www.dfat.gov.au/asean/110813_aem_cer_joint_media_statement.html diakses tanggal 6 Maret 2012.

<http://www.aseminfoboard.org/history.html> diakses tanggal 6 Maret 2012.

<http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Mission-Statement.aspx> diakses tanggal 6 Maret 2012.

http://www.bimstec.org/about_bimstec.html diakses tanggal 6 Maret 2012.

<http://www.asean.org/5740.htm> diakses tanggal 7 Maret 2012.

<http://www.aseansec.org/23222.htm> diakses tanggal 7 Maret 2012.

<http://www.asean.org/5874.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

<http://www.asean.org/5738.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

<http://www.aseansec.org/7672.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

<http://www.asean.org/5826.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

<http://www.asean.org/5922.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

<http://www.nationmultimedia.com/2011/05/06/mekong/Asean-refuses-to-make-Pakistan-full-dialogue-partn-30154747.html> diakses tanggal 14 Maret 2012.

<http://www.asean.org/24052.htm> diakses tanggal 9 Maret 2012.

http://english.peopledaily.com.cn/200310/08/eng20031008_125556.shtml diakses tanggal 16 Maret 2012.

Lai Suet-yi. *“To “Bi” or not to “Bi”? Bilateralism in Inter-regionalism.*
http://www.iedonline.eu/cms/.../Bilateralism_Lai.doc

Ms. Catherine Colonna, Minister delegate for European Affairs, Perancis, “France-ASEAN: A relationship serving geopolitical equality”, http://www.ambafrance-sg.org/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_070109_tribune_asean_eng.pdf diakses tanggal 16 Maret 2012

<http://www.asean.org/PR-42AMM-US-Signed-TAC.pdf> diakses tanggal 16 Maret 2012.

<http://opencrs.com/document/R40583/2009-05-05/> diakses tanggal 16 Maret 2012.

<http://www.aseansec.org/26730.htm> diakses tanggal 16 Maret 2012.

<http://www.antaraneews.com/berita/284956/brazil-akan-jadi-negara-tac-dengan-asean> diakses tanggal 16 Maret 2012.

<http://www.aseansec.org/16674.pdf> diakses tanggal 22 Maret 2012.

<http://aseanonthemove.com/asean-trade-2/> diakses tanggal 22 Maret 2012

<http://www.apcss.org/Publications/APSSS/ChinaandSoutheastAsia.pdf>.

“EU-ASEAN AND THE CASE OF BURMA ASEAN-EU meeting postponed over Myanmar issue “ http://www.tni.org/archives/asean-watch_asean37 diakses tanggal 23 Maret 2012

EU, ASEAN clash on Myanmar sanctions, but both call for reforms,
http://news.monstersandcritics.com/asiapacific/news/article_1375525.php/EU_ASEAN_clash_on_Myanmar_sanctions_but_both_call_for_reforms

David Camroux (2008). *The European Union and ASEAN: Two to tango.* Research paper, Notre Europe, dipublikasikan dalam http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etude65EU-ASEAN-en.pdf diakses tanggal 23 Maret 2012.

Hillari Clinton, (2011) *America's Pacific Century*.
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century diakses tanggal 23 Maret 2012.

Benjamin Ho, RSIS. (2012). "ASEAN centrality: a year of big power transitions" dalam *East Asia Forum*, 6 Maret 2012, <http://www.eastasiaforum.org/2012/03/06/asean-centrality-a-year-of-big-power-transitions/> diakses 23 Maret 2012.

Mark J. Valencia. (2012). "Diplomatic Drama: The South China Sea Imbroglia" http://www.globalasia.org/V6N3_Fall_2011/Mark_J_Valencia.html diakses tanggal 23 Maret 2012.

Documents

Chairs' statement of the 19th ASEAN Summit, Bali, 17 Nopember 2011.

"*ASEAN's Strategy towards its dialogue Partners and ASEAN Plus Three Process*", disampaikan oleh S Pushpanathan, Kepala, Hubungan Eksternal, Sekretariat ASEAN, pada ASEAN COCI Seminar on ASEAN new issues and Challenges, di Hanoi, 3-4 Nopember 2003.

"DECLARATION ON ACCESSION TO THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA BY THE EUROPEAN UNION AND EUROPEAN COMMUNITY" disampaikan pada 17th ASEAN-EU Ministerial Meeting (AEMM) 27-28 May 2009, Phnom Penh, Cambodia

ASEAN's Strategy towards its dialogue Partners and ASEAN Plus Three Process", disampaikan oleh S Pushpanathan, Kepala, Hubungan Eksternal, Sekretariat ASEAN, pada ASEAN COCI Seminar on ASEAN new issues and Challenges, di Hanoi, 3-4 Nopember 2003. <http://www.asean.org/15397.htm> diakses tanggal 14 Maret 2012.

2002 Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan 2002-2008, diadopsi oleh Kepala-kepala Negara/Pemerintahan pada KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, 4 Nopember 2002. <http://www.asean.org/14237.htm> diakses tanggal 14 Maret 2012.

Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work Plan 2 (2009-2015)

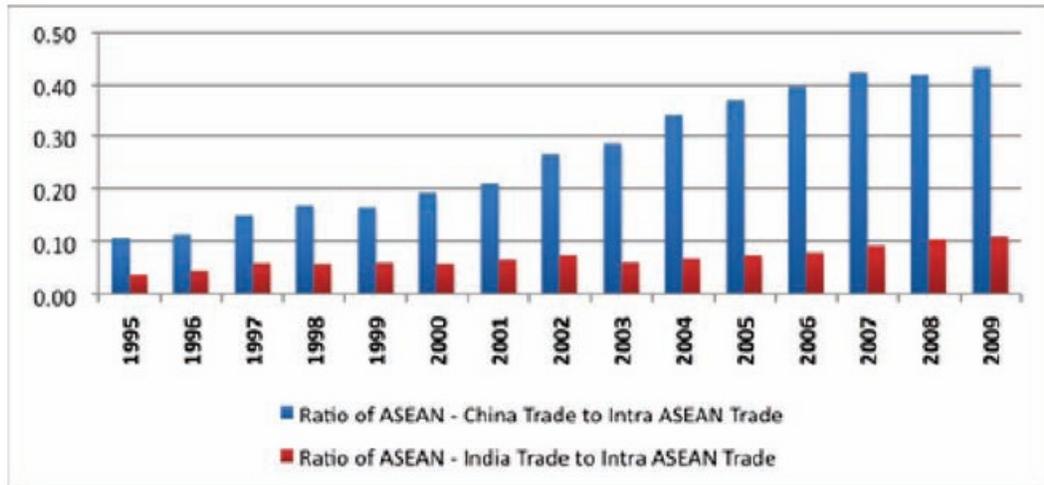
1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, diadopsi pada KTT ASEAN I di Bali, 24 Februari 1976. <http://www.aseansec.org/1217.htm> diakses tanggal 10 Maret 2012.

EU-ASEAN: 30 years of ever closer relations. Europa Press Releases. 20 November 2007.
<http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/asean-eu-declarations--24661/index.html> diakses tanggal 16 Maret 2012

Press Conference on ASEAN Connectivity Symposium (9/11), Enhancing ASEAN connectivity to support ASEAN Community, 8-9 Nopember 2011,
<http://www.aseancommunityindonesia.org/siaran-pers/583-press-conference-on-asean-connectivity-symposium-911.html> diakses tanggal 23 Maret 2012.

Lampiran 1.

Rasio Perdagangan ASEAN-China dan ASEAN-India ke Perdagangan Intra ASEAN



million US dollars

Table 18
Intra- and extra-ASEAN trade, 2005
as of 10 July 2010

Country	Intra-ASEAN exports		Extra-ASEAN exports		Total exports		Intra-ASEAN imports		Extra-ASEAN imports		Total imports		Intra-ASEAN trade		Extra-ASEAN trade		Total trade
	Value	Share to total exports	Value	Share to total exports	Value	Share to total exports	Value	Share to total imports	Value	Share to total imports	Value	Share to total imports	Value	Share to total trade	Value	Share to total trade	
Brunei Darussalam	1,229.2	17.1	8,826.2	82.9	7,188.8	81.8	1,242.8	81.8	1,198.8	48.2	2,288.8	48.2	2,472.1	28.8	7,288.1	74.2	8,517.3
Cambodia	844.8	12.8	4,241.2	37.1	4,288.8	37.3	1,483.2	27.3	2,447.8	62.7	2,688.8	62.7	2,687.8	24.8	6,788.8	78.8	8,476.6
Indonesia	24,822.8	27.1	87,288.1	78.9	118,278.9	78.9	27,742.4	28.7	88,888.8	74.3	88,888.8	74.3	82,288.2	24.8	188,877.8	78.8	213,366.6
Latvia-POL	887.4	88.8	288.8	19.4	1,287.2	88.8	1,488.8	88.8	244.2	14.2	1,733.0	14.2	2,478.2	82.7	484.0	18.2	2,249.0
Malaysia	48,288.1	28.2	118,228.8	74.3	188,888.8	74.3	87,888.2	28.7	87,888.2	74.3	122,288.2	74.3	122,288.2	28.7	288,188.2	74.3	388,227.4
Myanmar	2,188.1	88.4	1,144.8	88.8	8,244.2	83.7	2,088.7	83.7	1,744.1	48.3	3,488.8	48.3	3,488.8	81.8	4,888.8	88.8	5,077.6
Philippines	8,288.4	18.2	22,488.2	84.8	38,234.7	84.8	11,888.1	28.4	28,272.8	74.8	48,232.8	74.8	17,288.8	28.7	68,488.1	78.8	82,888.8
Singapore	87,288.2	28.2	188,188.8	88.1	288,288.2	88.1	88,888.2	24.3	188,188.1	78.1	248,188.1	78.1	248,188.1	27.2	374,888.1	72.2	422,076.3
Thailand	22,488.8	21.2	128,288.8	78.1	188,288.8	78.1	122,288.8	28.2	122,288.8	88.1	122,288.8	88.1	122,288.8	28.2	274,888.8	78.2	296,377.6
Viet Nam	8,288.8	18.1	48,188.2	84.8	88,888.2	84.8	88,888.2	28.8	88,888.2	88.4	88,288.8	88.4	88,288.8	17.8	100,888.4	88.4	109,177.6
ASEAN	188,288.2	28.8	878,288.2	78.4	878,288.2	78.4	178,288.1	28.3	848,124.8	78.7	728,288.1	78.7	728,288.1	24.8	1,588,288.8	78.8	1,888,288.2

Notes: ASEAN Trade in Goods (ATIGA) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Services (ATS) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Investment (ATI) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Intellectual Property (AIP) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Environment (ATE) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Culture (AC) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Sports (AS) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Tourism (AT) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Education (AE) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Health (AH) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Science (AS) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Technology (AT) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Energy (AE) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Environment (ATE) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Culture (AC) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Sports (AS) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Tourism (AT) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Education (AE) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Health (AH) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Science (AS) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Technology (AT) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries. ASEAN Trade in Energy (AE) includes intra-ASEAN trade, extra-ASEAN trade, and ASEAN trade with other countries.

Source: ASEAN Secretariat, ASEAN Trade in Goods (ATIGA) and ASEAN Trade in Services (ATS) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Investment (ATI) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Intellectual Property (AIP) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Environment (ATE) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Culture (AC) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Sports (AS) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Tourism (AT) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Education (AE) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Health (AH) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Science (AS) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Technology (AT) data, 2005-2009. ASEAN Trade in Energy (AE) data, 2005-2009.

Lampiran 3

